



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1508, 2017

KEMEN-LHK. Rencana Kerja. Tahun 2018.

PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR P.52/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2017

TENTANG

RENCANA KERJA KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP
DAN KEHUTANAN TAHUN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019, mengamanatkan setiap Kementerian/Lembaga Negara menyusun Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2015-2019 yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN);
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MENLHK-II/2015 ditetapkan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2018;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
10. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
11. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
12. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
13. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 184);
14. Peraturan Menteri Perencanaan dan Pembangunan/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 860);
15. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P. 18/MENLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 713);
16. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.39/MENLHK-SETJEN/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Tahun 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1195);

17. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2017 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 730);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG RENCANA KERJA KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TAHUN 2018.

Pasal 1

Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2018 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 2

Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2018 ini menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahun 2018 Eselon I dan Eselon II lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Pasal 3

Unit Pelaksana Teknis lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyusun Rencana Kerja Tahun 2018 mengacu pada Rencana Kerja Unit Kerja Eselon I terkait.

Pasal 4

Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menjadi arahan dalam hal penentuan kebijakan dan strategi pembangunan sektor lingkungan hidup dan kehutanan daerah yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.

Pasal 5

Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ini merupakan penyesuaian Sasaran dan Indikator sesuai dengan Prioritas Nasional Tahun 2018, dan dijadikan sebagai Tolak Ukur dalam pelaksanaan kegiatan dan evaluasi di Tahun 2018.

Pasal 6

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Oktober 2017

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SITI NURBAYA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 Oktober 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR
P.52/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2017
TENTANG RENCANA KERJA KEMENTERIAN
LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TAHUN
2018

RENCANA KERJA
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TAHUN 2018

DAFTAR ISI

Daftar Isi	8
Pengantar Menteri	9
Daftar Pustaka	10
I. Pendahuluan : Pembangunan Nasional 2018	11
II. Strategi Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2018 : Peran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam Pembangunan Nasional 2018	14
III. Pagu Anggaran dan Evaluasi Keberhasilan	30
IV. Penutup	37
V. Lampiran	38

Pengantar Menteri

Rencana Kerja Pemerintah 2018 diimplementasikan dalam Rencana pembangunan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2018 dengan pendekatan yang holistik-tematik, integratif, dan tidak melupakan sisi spasial. Prioritas Nasional, menjadi “*point of view*” dalam pengendalian perencanaan, perkuatan perencanaan dan penganggaran, perkuatan perencanaan berbasis kewilayahan, dan perkuatan integrasi sumber pendanaan, yang terus dilakukan dalam rangka menajamkan capaian sasaran target pembangunan jangka menengah sebagaimana yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Menengah dan Renstra KLHK 2015-2019. Pada tahun 2018 kondisi yang akan dicapai adalah 15 DAS prioritas sudah mampu memberikan dukungan terhadap ketahanan air, 329 KPH dapat dioperasikan, 50 Taman Nasional mampu memberikan sumbangan terhadap penyerapan tenaga kerja dan dukungan terhadap akselerasi pembangunan ekonomi nasional. Hutan yang dikelola masyarakat melalui perhutanan sosial sudah memberikan keyakinan mampu memberikan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan tercapainya peningkatan hasil hutan.

Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan juga dilaksanakan dengan mengacu kepada tema Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2018 yaitu “Memacu Investasi dan Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Untuk Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas”.

Dalam mengawal kondisi lingkungan hidup dan kehutanan, siklus perencanaan sampai dengan pelaporan dihimpun dalam hasil pembangunan 2017 dengan menarik pelajaran dari tahun sebelumnya sebagai pijakan dalam pelaksanaan pembangunan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2018, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Tahun 2018.

Pencapaian tahun 2017 yang terdapat dalam 13 program dengan 97 kegiatan, dan setiap kinerja yang dihasilkan merupakan kesatuan yang penting dalam pencapaian Kementerian. Rencana Kerja 2018 ini berusaha terus membangun dan meningkatkan mekanisme upaya perbaikan di tingkat tapak.

Akhirnya, semoga Allah SWT memberikan setiap rahmat NYA kepada kita semua, sehingga kita dapat memenuhi setiap kinerja yang telah dirumuskan dan memperbaiki kondisi tapak seperti yang telah diharapkan

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SITI NURBAYA

DAFTAR PUSTAKA

1. Bappenas 2017, Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2018
2. Biro Perencanaan, 2017, Laporan Kinerja 2016
3. Biro Pusat Statistik, 2017

I. Pendahuluan :

Pembangunan Nasional 2018

Sebagai latar belakang pembangunan nasional di tahun 2018, berikut gambaran makro perekonomian nasional sampai dengan tahun 2016 dimana pertumbuhan ekonomi mencapai **5 %** di tahun 2016. Sementara nilai Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga konstan (ADHK) mencapai Rp 2.385,6 triliun. Sedangkan PDB atas dasar harga berlaku (ADBH) mencapai Rp3.194,8 triliun. Tingkat pengangguran : **5,61 %** , Kemiskinan: 10,70 % (per September 2016) Rasio Gini: **0,397** (per Maret 2016), Indeks Pembangunan Manusia : 70.18 (BPS, Update April 2017) .Perkiraan pertumbuhan tahun 2017 sebesar 3,35%, serapan investasi dalam negeri 471,81 miliar rupiah (BPS, Oktober 2016, serapan tenaga kerja 8.643.228 (BPS, Februari 2017) sedangkan pertumbuhan ekonomi nasional di Tahun 2018 diperkirakan 5,6 persen.

Dalam rangka meningkatkan kinerja serta efisiensi anggaran serta meningkatkan pencapaian target pembangunan nasional jangka menengah, dilakukan penajaman prioritas nasional dari 23 prioritas nasional dan 88 Proyek Prioritas di tahun 2017 menjadi 10 prioritas nasional dan 30 Proyek Prioritas Nasional di tahun 2018. Disamping itu disusun pula skala prioritas dari masing-masing program prioritas yang akan digunakan jika terdapat kenaikan/penurunan anggaran.

Prioritas Belanja Pemerintah dilakukan dalam rangka Pencapaian Sasaran Prioritas Nasional.

Tema Rencana Kerja Pemerintah tahun 2018 dimana investasi dipacu untuk memantapkan pembangunan infrastruktur dalam rangka percepatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, dilakukan dengan upaya-upaya antara lain :

- Memperbaiki **kualitas belanja**.
- Peningkatan **iklim usaha dan iklim investasi** yang lebih kondusif
- Peningkatan **daya saing** dan **nilai tambah** industri
- Peningkatan **peran swasta** dalam pembiayaan dan pembangunan infrastruktur

Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang merupakan bagian dari Rencana Kerja Pemerintah bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan merupakan upaya menjaga kesinambungan pembangunan terencana dan sistematis yang dilaksanakan oleh pemerintah, dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif, transparan dan akuntabel untuk mewujudkan visi misi presiden Republik Indonesia. Tema Rencana Kerja Pemerintah adalah "Memacu Investasi dan Infrastruktur untuk pertumbuhan dan pemerataan.

Penyusunan RKP tahun 2018 dengan prinsip *money follows program* menggunakan pendekatan Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial dengan penajaman substansi perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi. Pendekatan tersebut dilakukan dalam rangka mengupayakan integrasi substansi (hulu-hilir/holistik); integrasi spasial (keterkaitan kegiatan dalam suatu lokasi); pembagian kewenangan (kerangka regulasi) antar kementerian/lembaga, provinsi, kabupaten/kota dan pembagian sumber pendanaan (kerangka pendanaan), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Dana

Alokasi Khusus (DAK), pembiayaan Investasi, dan kerjasama pemerintah dengan badan usaha serta pembiayaan Investasi non APBN.

Sinkronisasi perencanaan dan penganggaran juga diupayakan sebagaimana amanat PP No. 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional, untuk meningkatkan efektifitas pelaksanaan pembangunan nasional, serta pengendalian pencapaian sasaran Prioritas Nasional. Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2018 dan selanjutnya dituangkan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RUU APBN) 2018.

Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2018 sektor lingkungan hidup dan kehutanan terbagi dalam 6 isu utama yaitu:

1. Lokasi sumberdaya hutan untuk pemerataan ekonomi (tata perizinan, hutan sosial, reforma agraria, pangan, energi, ketahanan air dan sumber penopang pusat pertumbuhan wilayah).
2. Pengendalian deforestasi dan degradasi hutan/lahan (illegal logging, karhutla, peti, tata perizinan, law enforcement, pemulihan lingkungan).
3. Konservasi dan pemeliharaan bio-diversity dan biosfer (peningkatan dan penanganan tumbuhan dan satwa langka/TSL, serta pemeliharaan dan peningkatan kualitas udara, air dan tanah/bentang alam).
4. Peningkatan produksi dan produktivitas hutan dan jasa lingkungan (peningkatan usaha produksi kayu, hasil hutan non kayu, ekowisata/jasa lingkungan lainnya, daur ulang/circular economy, serta peningkatan manajemen usaha rakyat).
5. Pengendalian kejahatan lingkungan (penataan regulasi, penertiban pengawasan perizinan dan penegakan hukum).
6. Kemitraan dan keterlibatan multistakeholders dalam rantai usaha sumberdaya hutan dan sumberdaya sampah/limbah dan dalam pengawasan sosial perizinan dan pengendalian lingkungan serta dalam mendorong *law enforcement*.

Arah kebijakan pembangunan bidang sumberdaya alam dan lingkungan hidup sebagaimana tertuang dalam dokumen RKP 2018 adalah sebagai berikut :

1. Penguatan mitigasi perubahan iklim melalui:
 - a. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca dan Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca;
 - b. Peningkatan dan pengembangan kegiatan penurunan emisi pada sektor utama kehutanan dan lahan gambut, pertanian energi dan transportasi, industri dan limbah;
 - c. Peningkatan kontribusi swasta dan masyarakat dalam penurunan emisi GRK;
 - d. Pengembangan dan mobilisasi sumberdaya untuk perubahan iklim, termasuk penguatan pengelolaan pendanaan hibah untuk penanganan perubahan iklim, termasuk melalui Lembaga Wali Amanat Perubahan Iklim;

- e. Peningkatan inventarisasi GRK di pusat dan daerah.
2. Penguatan pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Adaptasi Perubahan Iklim (RAN-API) dengan melakukan penguatan mekanisme dan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan adaptasi di pusat dan daerah serta peningkatan pengetahuan dan kapasitas masyarakat terkait dengan adaptasi perubahan iklim.
 3. Peningkatan Konservasi, Pengelolaan DAS serta Pelestarian dan Pemanfaatan Keanekaragaman Hayati:
 - a. Konservasi hutan dan tata kelola hutan melalui Pembentukan dan operasionalisasi Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) dan peningkatan efektivitas pengelolaan kawasan hutan konservasi di tingkat tapak;
 - b. Pengelolaan DAS melalui Pemulihan dan perlindungan mata air di 15 DAS prioritas dan rawan bencana, peningkatan efektifitas pengelolaan kawasan hutan konservasi ditingkat tapak;
 - c. Pelestarian dan pemanfaatan ekonomi keanekaragam hayati melalui peningkatan kelestarian lingkungan hidup, peningkatan kualitas dan kuantitas kehati dengan melakukan perlindungan spesies, ekosistem dan genetik dan pengembangan dan penerapan kebijakan pelestarian keanekaragaman hayati baik secara in-situ dan eks-situ;
 - d. Perlindungan dan pengamanan ekosistem hutan, sumberdaya spesies, serta sumberdaya genetik melalui pembentukan pusat penelitian terintegrasi tentang keanekaragaman hayati di dalam taman nasional dan KPHK, peningkatan kerjasama (kemitraan) dengan pihak ketiga dalam pengelolaan penangkaran eks-situ tanaman dan satwa liar serta penyelamatan 20 satwa dan tumbuhan langka, peningkatan pelestarian keanekaragam hayati di luar kawasan hutan dan peningkatan inventarisasi keanekaragam hayati baik di dalam maupun di luar kawasan hutan.
 4. Peningkatan kualitas lingkungan hidup serta peningkatan kualitas informasi iklim dan kebencanaan:
 - a. Perbaikan kualitas lingkungan hidup diarahkan untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang menyeluruh di setiap sektor pembangunan dan daerah yang tercermin pada meningkatnya kualitas air, udara, lahan/hutan yang didukung kapasitas pengelolaan lingkungan yang kuat mencakup kelembagaan, sumberdaya manusia, penegakana hukum lingkungan, dan kesadaran masyarakat, sehingga terwujud pembangunan yang ramah lingkungan serta kehidupan masyarakat dalam lingkungan yang bersih dan sehat.
 - b. Peningkatan kualitas lingkungan hidup melalui penurunan beban pencemaran air, udara dan lahan, pengendalian pencemaran pesisir dan laut, pengolahan sampah melalui bank sampah dan pusat daur ulang sampah, penerapan *Extended Proucer Responsibility (EPR)*, dan pemanfaatan sampah untuk sumber energi

II. Strategi Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2018

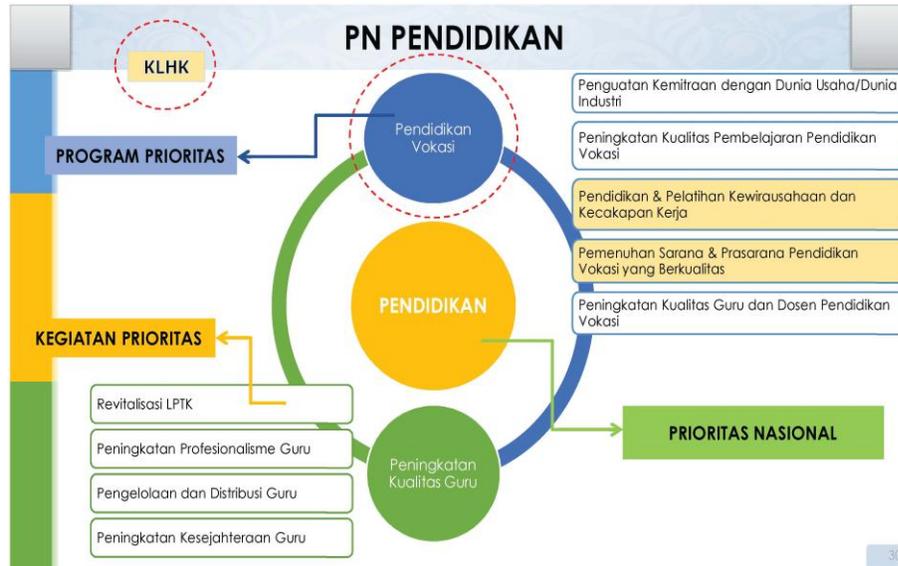
Peran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam Pembangunan Nasional 2018

Pembangunan Nasional Tahun 2018 menetapkan 10 prioritas pembangunan nasional yang merupakan fokus pembangunan secara nasional, dalam rangka meningkatkan efisiensi serta memaksimalkan ketersediaan anggaran nasional.

1. **Pendidikan (Prioritas Nasional)**
 - a. Pendidikan Vokasi (Program Prioritas);
 - b. Peningkatan kualitas guru.
2. **Kesehatan**
 - a. Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak;
 - b. Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit;
 - c. Preventif dan Promotif (Gerakan Masyarakat Hidup Sehat).
3. **Perumahan dan Pemukiman**
 - a. Penyediaan Perumahan Layak;
 - b. Air Bersih dan Sanitasi.
4. **Pengembangan Dunia Usaha dan Pariwisata**
 - a. Pengembangan 3 Kawasan Pariwisata (dari 10);
 - b. Pengembangan 5 Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) (dari 10);
 - c. Pengembangan 3 Kawasan Industri (KI) (dari 14);
 - d. Perbaikan Iklim Investasi dan Penciptaan Lapangan Kerja;
 - e. Pengembangan Ekspor Barang Jasa Bernilai Tambah Tinggi.
5. **Ketahanan Energi**
 - a. EBT dan Konservasi Energi;
 - b. Pemenuhan Kebutuhan Energi.
6. **Ketahanan Pangan**
 - a. Peningkatan Produksi pangan;
 - b. Pembangunan sarana dan prasarana pertanian (termasuk irigasi).
7. **Penanggulangan Kemiskinan**
 - a. Jaminan dan Bantuan Sosial Tepat Sasaran;
 - b. Pemenuhan Kebutuhan Dasar;
 - c. Peningkatan Daya Saing UMKM dan Koperasi.
8. **Infrastruktur, Konektivitas, dan Kemaritiman**
 - a. Pengembangan Sarana dan Prasarana Transportasi (darat, laut, udara, dan inter-moda);
 - b. Pengembangan Telekomunikasi dan Informatika.
9. **Pembangunan wilayah**
 - a. Pembangunan Wilayah Perbatasan dan Daerah Tertinggal;
 - b. Pembangunan Perdesaan;
 - c. Reforma Agraria;
 - d. Pencegahan dan Penanggulangan Bencana (a.l Kebakaran Hutan);
 - e. Percepatan Pembangunan Papua.
10. **Politik, Hukum, dan Pertahanan Keamanan**
 - a. Penguatan Pertahanan;
 - b. Stabilitas Politik dan Keamanan;
 - c. Kepastian Hukum;
 - d. Reformasi Birokrasi.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan berperan dalam 9 prioritas nasional dari 10 prioritas nasional sebagaimana uraian berikut:

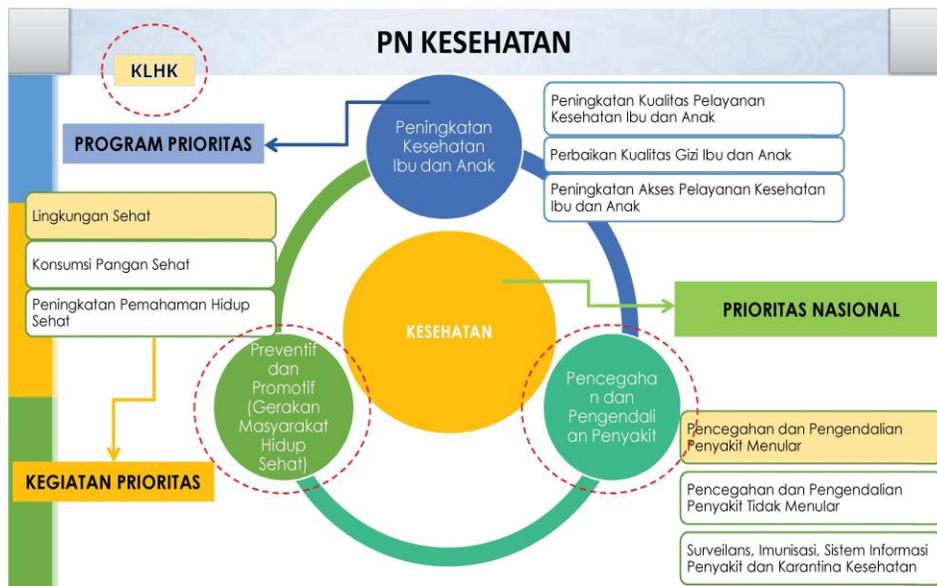
1. **PRIORITAS NASIONAL PENDIDIKAN**



Kegiatan Prioritas	Proyek Prioritas Nasional	Proyek Rincian K/L	TARGET		Program LH dan Kehutanan	Lokus
			2017	2018		
Pendidikan dan Pelatihan Kewirausahaan dan Kecakapan Kerja	Pendidikan dan Pelatihan Kewirausahaan dan Kecakapan Kerja	Penyelenggaraan sekolah menengah kejuruan kehutanan	420 Orang	450 Orang	P2SDM	SMKN Kadipaten (Majalengka, Jawa Barat), SMKN Pekanbaru (Riau), SMKN Makassar (Sulawesi), SMKN Samarinda (Kalimantan Timur), SMKN Manokwari (Papua Barat)
Pemenuhan Sarpras Pendidikan Vokasi yang Berkualitas	Peningkatan Kualitas Sarana Pembelajaran dan Praktek Kerja Pendidikan Vokasi	Pengembangan KHDTK sebagai sarana pembelajaran kediklatan untuk mendukung SMK Kehutanan dan lainnya	2 Unit	2 Unit	P2SDM	BDLHK Kadipaten Sawala Mandapa, BDLHK Makassar Tabo Tabo, BDLHK Pekanbaru Bukit Suligi, BDLHK Samarinda Loa Haur

Dalam rangka mendukung Prioritas Nasional Pendidikan strategi Kementerian Lingkungan Hidup adalah dengan penyediaan tenaga teknis menengah kejuruan dengan kinerja yang dibiayai adalah penyelenggaraan Sekolah Menengah Kejuruan Kehutanan dan Pengembangan KHDTK sebagai sarana pembelajaran kediklatan untuk mendukung SMK Kehutanan dan lainnya.

2. PRORITAS NASIONAL KESEHATAN



Proyek Prioritas Nasional	Proyek Rincian K/L	TARGET		Program dan LH Kehutanan	Lokus
		2017	2018		
Pengendalian Penyakit Tropis Terabaikan/ <i>Neglected Tropical Diseases</i> Salah satunya <i>Schistosomiasis</i>	Penerapan intervensi metode agroengineering di daerah buffer TN Lore Lindu	-	500 ha	KSDAE	Taman Nasional Lore Lindu, Kab. Poso
	Restorasi ekosistem untuk pengendalian penyebaran keong di TN Lore Lindu	-	300 ha	KSDAE	Taman Nasional Lore Lindu, Kab. Poso
	Pengamanan kawasan TN Lore Lindu	-	218.000 ha	KSDAE	Taman Nasional Lore Lindu, Kab. Poso

Dalam rangka mendukung Prioritas Nasional Pendidikan strategi Kementerian Lingkungan Hidup adalah dengan penyediaan tenaga teknis menengah kejuruan dengan kinerja yang dibiayai adalah penyelenggaraan Sekolah Menengah Kejuruan Kehutanan dan Pengembangan KHDTK sebagai sarana pembelajaran kediklatan untuk mendukung SMK Kehutanan dan lainnya.

3. PRIORITAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN



Kegiatan Prioritas	Proyek Prioritas Nasional	Proyek Rincian K/L	Target		Program LH dan Kehutanan	Lokus
			2017	2018		
Peningkatan Ketersediaan Air Baku	Simpan Air	Penyediaan Sumur Resapan Air di 15 DAS Prioritas	7.500 Unit	6.000 Unit	PDASHL	15 DAS prioritas: Sumut, Jateng, Jatim, Jabar, Banten, Sulsel, Kalbar, Gorontalo, NTB, Sumsel, Riau, Lampung

Untuk Prioritas Nasional Perumahan dan Permukiman, strategi yang dilaksanakan tahun 2018 adalah dengan meningkatkan resapan air di perumahan dan permukiman di 15 DAS Prioritas dengan kinerja Penyediaan Sumur Resapan di 15 DAS Prioritas sejumlah 6.000 unit.

4. PRIORITAS NASIONAL PENGEMBANGAN DUNIA USAHA DAN PARIWISATA



Kegiatan Prioritas	Proyek Prioritas Nasional	Proyek Rincian K/L	Target		Program LH dan Kehutanan	Lokus
			2017	2018		
Pengembangan Danau Toba	Penumbuhan inovasi produk dan kapasitas daya tarik wisata	Pembangunan sarpras ekowisata pada Taman Wisata Alam di Kawasan Danau Toba	10 Unit Kawasan Konservasi	7 Unit TWA	KSDAE	Kawasan Danau Toba: TWA Holiday Resort (Sumut), TWA Lau Debuk-Debuk (Sumut), TWA Sibolangit (Sumut), TWA Sিকে-cike (Sumut), Pulau Weh (NAD), atraksi gajah di KHDTK Aek Nauli (Sumut), TWA Kep. Banyak (Aceh)
		Pembangunan sarpras pariwisata pada Taman Nasional di Kawasan Danau Toba	14 Unit TN	2 Unit TN	KSDAE	TN Gunung Leuser (Sumut), TN. Batang Gadis (Sumut)
	Penciptaan destinasi bersih, sehat dan berkelanjutan	Pengkajian dan Pengembangan Konservasi Kehati terancam Punah (tematik daerah)	-	5 Paket	KSDAE	Danau Toba (Sumut)
Pengembangan Borobudur dan sekitarnya	Penumbuhan inovasi produk dan kapasitas daya tarik wisata	Pembangunan sarpras pariwisata pada Taman Wisata Alam di Kawasan Borobudur dan sekitarnya	1.000.000 Orang	4 Unit TWA	KSDAE	TWA Telogo Warno-Telogo Pengilon, TWA Grojogan Sewu, TWA Guci, TWA Selok (Jateng)
		Pembangunan sarpras pariwisata pada Taman Nasional di Kawasan Borobudur dan sekitarnya	1.500.000 orang	2 Unit TN	KSDAE	TN Gunung Merapi (D.I.Y), TN Gunung Merbabu (Jateng)
Pengembangan Mandalika	Penumbuhan inovasi produk dan kapasitas daya tarik wisata	Pembangunan sarpras pariwisata pada Taman Wisata Alam di Kawasan Mandalika dan sekitarnya	6 Unit	8 Unit TWA	KSDAE	BKSDA NTB, TWAL Pulau Moyo (NTB), TWA Danau Rawa Taliwang (NTB), TWA Suranadi (NTB), TWA Kerandangan (NTB), TWA Tanjung Tampa (NTB), TWA Gunung Tunak (NTB), TWA Semongkat (NTB), TWAL Pulau Satonda (NTB)
		Pembangunan sarpras pariwisata pada Taman Nasional di Kawasan Mandalika dan sekitarnya	6 Unit	3 Unit TN	KSDAE	TN. G.Rinjani (NTB), TN.Tambora (NTB), TN. Bali Barat (Bali)

Strategi Kementerian LHK dalam mendukung Priroritas Nasional Pengembangan Dunia Usaha dan Pariwisata adalah dengan penyedia sarana pariwisata di destinasi wisata unggulan utamanya di Taman Nasional dan Taman Wisata Alam dengan kinerja antara lain : Pembangunan sarpras ekowisata pada Taman Wisata Alam di Kawasan Danau Toba, Pembangunan sarpras pariwisata pada.

Taman Nasional di Kawasan Danau Toba, Pengkajian dan Pengembangan Konservasi Kehati terancam Punah (tematik daerah), Pembangunan sarpras pariwisata pada Taman Wisata Alam di Kawasan Borobudur dan sekitarnya, Pembangunan sarpras pariwisata pada Taman Nasional di Kawasan Borobudur dan sekitarnya, Pembangunan sarpras pariwisata pada Taman Wisata Alam di Kawasan Mandalika dan sekitarnya dan Pembangunan sarpras pariwisata pada Taman Nasional di Kawasan Mandalika dan sekitarnya.

5. PRIORITAS NASIONAL KETAHANAN ENERGI



Proyek Prioritas Nasional	Proyek Rincian K/L	TARGET		Program LH dan Kehutanan	Lokus
		2017	2018		
Proyek penyediaan energi berbasis air (mini/mikro hidro) di kawasan konservasi sebesar 1.500 Kw	Pembangunan mini/mikrohidro di Kawasan Konservasi non Taman Nasional	1.000 Kwatt	35 Kwatt	KSDAE	SM Tanjung Peropa (Sultra), SM Buton Utara (Sultra)
	Pembangunan mini/mikrohidro di Taman Nasional	500 Kwatt	12.365 Kwatt	KSDAE	TN Bukit Tiga Puluh (Riau), TN Gunung Palung (Kalbar), TN Gunung Rinjani (NTB), TN Bukit Barisan Selatan (Lampung), TN Kerinci Seblat (Sumbar), TN Gunung Leuser (Aceh)

Strategi Kementerian LHK dalam mendukung Prioritas Nasional Ketahanan Energi adalah meningkatkan kontribusi kawasan konservasi dalam penyediaan energi berbasis air (mini/mikrohidro), yang dijabarkan dengan kinerja pembangunan mini/mikrohidro di kawasan konservasi non taman Nasional (35 Kwatt) dan Taman Nasional (12.365 Kwatt).

6. PRIORITAS NASIONAL KETAHANAN PANGAN



Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Proyek Rincian K/L	TARGET		Program LH dan Kehutanan	Lokus
			2017	2018		
Pembangunan sarana dan prasarana pertanian (termasuk irigasi)	Pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi	Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis di DAS yang mendukung Ketahanan Pangan	15.000 Ha	8.500 Ha	PDASHL	34 Provinsi
		Pembangunan KTA-DAM Pengendali untuk mendukung Ketahanan Pangan	25 DAM Pengendali	2 DAM Pengendali	PDASHL	Jawa Barat, Jawa Tengah
		Pembangunan KTA-DAM Penahan untuk mendukung Ketahanan Pangan	4000 DAM Penahan	1.000 DAM Penahan	PDASHL	Aceh, Sumut, Riau, Sumbar, Jambi, Bengkulu, Sumsel, Kep. Bangka Belitung, Lampung, Banten, Jabar, Jateng, DIY, Jatim, Kalbar, Kalteng,

Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Proyek Rincian K/L	TARGET		Program LH dan Kehutanan	Lokus
			2017	2018		
						Kalsel, Kaltara, Sulut, Gorontalo, Sulteng, Sulbar, Sulsel, Sultra, Bali, NTB, NTT, Maluku, Papua Barat, Papua
		Pembangunan Gully Plug untuk mendukung Ketahanan Pangan	8000 Gully Plug	1.400 Gully Plug	PDASHL	Aceh, Sumut, Riau, Sumbar, Jambi, Bengkulu, Sumsel, Kep. Bangka Belitung, Lampung, Banten, Jabar, Jateng, DIY, Jatim, Kalbar, Kalteng, Kalsel, Kaltara, Sulut, Gorontalo, Sulteng, Sulbar, Sulsel, Sultra, Bali, NTB, NTT, Maluku, Papua Barat, Papua
		Penyediaan bibit berkualitas	37,5 juta batang	20 juta batang	PDASHL	34 Provinsi
		Penyediaan bibit produktif	2,5 juta batang	1,5 juta batang	PDASHL	34 Provinsi

Strategi Kementerian LHK dalam mendukung Prioritas Ketahanan Pangan adalah dengan meningkatkan tutupan lahan di sempadan di daerah tangkapan air, sempadan danau, sempadan sungai, daerah imbuan air, di wilayah KPH dengan kinerja sebagaimana tercantum dalam proyek rincian K/L dengan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis di DAS yang mendukung Ketahanan Pangan, Pembangunan KTA-DAM Pengendali untuk mendukung Ketahanan Pangan, Pembangunan Gully Plug untuk mendukung Ketahanan Pangan, Penyediaan bibit berkualitas dan Penyediaan bibit produktif.

7. PRIORITAS NASIONAL PENANGGULANGAN KEMISKINAN



Kegiatan Prioritas	Proyek Prioritas Nasional	Proyek Rincian K/L	TARGET		Program LH dan Kehutanan	Lokus
			2017	2018		
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Koperasi dan Kemitraan Usaha	Fasilitasi Kelembagaan Usaha Koperasi bagi BUM Desa dan Kelompok Usaha Masyarakat	Pembentukan kelompok usaha perhutanan sosial (Hkm, HD, HTR, HR, Hutan Adat dan Kemitraan) yang mandiri	340 Kelompok	1980 Kelompok	PSKL	33 Provinsi: Aceh (10 klp), Bali (26 klp), Banten (24 klp), Bengkulu (10 klp), D.I. Yogyakarta (43 klp), Jambi (38 klp), Gorontalo (23 klp), Jawa Barat (44 klp), Jawa Tengah (69 klp), Jawa Timur (179 klp), Kalbar (33 klp), Kalsel (30 klp), Kalteng (49 klp), Kaltim (27 klp), Kaltara (26 klp), Babel (6 klp), Kepri (16 klp), Maluku (50 klp), Malut (16 klp), Lampung (49 klp), NTB (131 klp), NTT (59 klp), Papua (160 klp), Papua Barat (16 klp), Riau (43 klp), Sulbar (35 klp), Sulsel (439 klp), Sulteng (77 klp), Sultra (103 klp), Sulut (103 klp), Sumbar (56 klp), Sumsel (45 klp), Sumut (65 klp)
Perluasan Akses Pembiayaan	Penguatan Modal Usaha Bagi KUMKM dan Kelompok Usaha	Peningkatan jumlah kelas kelompok tani desa-desa hutan dari tingkatan pemula ke madya	450 Unit	367 Unit	P2SDM	Aceh (11 unit), Sumut (8 Unit), sumbar (23 unit), riau (13 unit), kepulauan Riau (3 unit), Jambi (11 unit), Sumsel (11 unit), Babel (6 unit), Bengkulu (8 unit), Lampung (21 unit), Jawa Barat (31 unit), banten (21 unit), Jateng (37 unit), Kalsel (16 unit), Kaltim (11 unit), Kaltara (6 unit), Sulut (11 unit), Gorontalo (11 unit), Sulteng (10 unit), DIY (21 unit), Jatim (26 unit), Bali (16 unit), NTB (16 unit), NTT (11 unit), Kalbar (7 unit), Kalteng (18 unit), Sulteng (11 unit), Sulsel (21 unit), Sulbar (6 unit), Maluku (6 unit), Maluku Utara (6 unit), Papua (11 unit), Papua Barat (5 unit)
Peningkatan Kualitas Produk dan Akses Pemasaran	Fasilitasi Sertifikasi, Standardisasi, Merek, dan Pengemasan	Fasilitasi sertifikasi SVLK bagi UMKM		150 kelompok (750 UMKM)	PHPL	18 Provinsi : Sumut (5 klp), Riau (5 klp), Jambi (5 klp), Sumsel (5 klp), Lampung (2 klp) Banten (10 klp), Jawa Barat (15 klp), Jawa Tengah (22 klp), DI Yogyakarta (10 klp), Jawa Timur (20 klp), Bali (10 klp), Kalbar (5 klp), Kalsel (5 klp), Kalteng (5 klp), Kaltim (3 klp), Sulut (6 klp), Gorontalo (5 klp), Sulteng (6 klp), Sulsel (5 klp)

Strategi Kementerian LHK dalam mendukung Prioritas Nasional Penangungulungan Kemiskinan adalah dengan pembentukan kelompok usaha perhutanan sosial, meningkatkan kapasitas pelaku utama dan pelaku usaha dalam pemberdayaan masyarakat, serta dengan mengoptimalkan ketertiban penatausahaan hasil hutan khususnya bagi UMKM dengan kinerja pembangunan LHK Pembentukan kelompok usaha perhutanan sosial (Hkm, HD, HTR, HR, Hutan Adat dan Kemitraan) yang mandiri untuk 340 kelompok, Peningkatan jumlah kelas kelompok tani desa-desa hutan dari tingkatan pemula ke madya sebanyak 450 unit dan Fasilitasi sertifikasi SVLK bagi UMKM bagi 150 kelompok (750 UMKM).

8. PRIORITAS NASIONAL PEMBANGUNAN WILAYAH



PN PENGEMBANGAN WILAYAH(1) : KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN PERDESAAN

Kegiatan Prioritas	Proyek Prioritas Nasional	Proyek Rincian K/L	TARGET		Program LH dan Kehutanan	Lokus
			2017	2018		
Penelolaan Sumber Daya Alam Desa dan Kawasan termasuk Kawasan Transmigrasi dan Sumber Daya Hutan	Penataan dan Perencanaan Kawasan Hutan	Penyelesaian penetapan kawasan hutan	10 % tambahan penetapan kawasan hutan di 2017	5% tambahan penetapan kawasan hutan	PKTL	Nasional (pusat), 19 Provinsi Banten (Lebak), Jawa Barat (Sukabumi), Jawa Timur (Banyuwangi, Bondowoso), NTT (Manggarai Barat, Sumba Tengah, Sumba Barat, Lembata, Kupang, Rote Ndao), Maluku (Seram Bagian Barat, Maluku Barat Daya), Maluku Utara (Halmahera Selatan, Kepulauan Sula, Halmahera Barat, Halmahera Timur, Morotai), Aceh (Bener Meriah, Aceh Tengah), Riau (Indragiri Hilir, Rokan Hilir), Sumatera Selatan (Musi Rawas, Banyuasin, Lahat, Musir Enim, Pali, Musi Banyuasin, Lubuk Linggau), Jambi (Batanghari dan Tebo, Tanjungbarr, Tanjungkiri, Musir Jambi, Bungo), Sulawesi Utara (Talaud, Sangihe, Sitaro, Minahasa Tenggara), Sulawesi Tengah (Donggala, Parigi Moutong, Poso), Sulawesi Selatan (Wajo, Gowa, Luwu, Bone), Papua (Teluk Bintuni, Teluk Wondama, Manokwari Selatan), Kalimantan Barat (Bengkayang, Kapuas Hulu, Kayong Utara, Ketapang, Sanggau, Kubu Raya, Landak, Melawi, Mempawah, Sambas, Sintang), Kalimantan Utara (Nunukan), Kalimantan Timur (Kutai Barat, Kutai Kartanegara, Penajam Paser Utara, Berau, Paser), Kalimantan Tengah (Pulang Pisau, Gunung Mas, Kotim, Kobar, Seruyan), Kalimantan Selatan (HSS, Tapin, Tanah Bumbu, Tanah Laut, Kotabaru)

Kegiatan Prioritas	Proyek Prioritas Nasional	Proyek Rincian K/L	Target		Program LH dan Kehutanan	Lokus
			2017	2018		
		Fasilitasi rancangan tata hutan dan rancangan rencana pengelolaan hutan KPH	40 KPH	65 KPH	PKTL	Nasional (22 BPKH) Prov. Sumatera Utara (Kab.Deli Serdang, Kab.Serdang Bedagai, Kab.Labuhan Batu, Kab.Samosir), Prov. Sumatera Barat (Kab.Pasaman Barat, Kab.Agam, Kab.Solok Selatan), Prov. Sumatera Selatan (Kab. Ogan Komering Hilir, Ogan Komering ulu, OKU Selatan, dan lahat), Prov. Kalimantan Barat, Prov. Kaltim, Prov. Kaltara, Prov. Kalimantan Selatan (Tabalong Kiwa, Tapin, Sengayam), Prov. Sulawesi Utara, Prov. Maluku Utara, Prov. Sulawesi Selatan, Prov. Sulawesi Barat, Prov. Bali, Prov. Maluku (Wae Bobot-Wae Kaba, Larat-Ranarmoye, Wae Ruatan, P. Ambon - P.P.Lease), Prov. Papua (Keerom, Merauke, Pegunungan Bintang, Nabire, Asmat, Nabire), Jawa Madura, Prov. Kepulauan Riau (Anambas), Prov. Bangka Belitung (Kab. Bungo, Merangin dan Tanjabar, Bangka Tengah, Bangka Selatan dan Belitung), Prov. Nusa Tenggara Timur (Sumba Barat), Gorontalo, Prov. Sulawesi Tengah (Kab. Morowali, Kab. Banggai), Prov. Papua Barat, Aceh, Prov. Riau (Kota Dumai, Kab. Bengkalis, Kab. Indragiri Hulu, Kab. Indragiri Hilir, Kab. Kuantan Singingi), Prov. Lampung (Kab. Pesisir Barat, Kab. Lampung Selatan), Prov. Kalimantan Tengah (Kab. Seruyan, Kab. Lamandau, Kab. Kotawaringin Barat, Kab. Kapuas), Prov. Sulawesi Tenggara
	Peningkatan akses masyarakat dalam pengelolaan hutan	Pengelolaan kolaboratif hutan konservasi bersama masyarakat sekitar kawasan hutan konservasi non taman nasional	27 Desa	26 Desa	PSKL	Seluruh Kawasan Konservasi; Sumut (1), Sumbar (1), Riau (4), Jambi (3), Sumsel (7), Babel (3), Bengkulu (1), Lampung (4), DIY (1), NTB (4), NTT (2), Kalbar (1), Kalsel (5), Kalteng (5), Kaltim (10), Sulut (1), Gorontalo (4), Sulteng (8), Sultra (6), Sulbar (3), Sulse (4), Maluku (2), Malut (4), Papua (3), Papua Barat (2)
		Pengelolaan kolaboratif hutan konservasi bersama masyarakat sekitar kawasan hutan konservasi di sekitar Taman Nasional	50 Desa	48 Desa	KSDAE	Seluruh Kawasan Konservasi : Aceh, Sumatera Barat, Riau, Bengkulu, Sumatera Selatan, NTB, NTT, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Barat, Papua Barat
		Pengelolaan hutan produksi (KPHP) untuk produksi barang dan jasa berbasis kemitraan dengan masyarakat desa	63 KPH Produksi	89 KPH Produksi	PHPL	25 Provinsi: Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Sumsel, Babel, Bengkulu, Lampung, Bali, NTB, NTT, Kalbar, Kalsel, Kaltara, Kaltim, Kalteng, Sulut, Gorontalo, Sulteng, Sulbar, Sulse, Sultra, Maluku, Papua Barat, Papua
		Pengembangan HHBK di Hutan Lindung	1.000 Ha	1000 Ha	PDASHL	Aceh, Sumatera Barat, Riau, Bengkulu, Sumatera Selatan, NTB, NTT, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Barat, Papua Barat
		Pengelolaan hutan lindung (KPHL) berbasis masyarakat desa setempat	80 KPHL	80 KPHL	PDASHL	Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Sumsel, Babel, Bengkulu, Lampung, Bali, NTB, NTT, Kalbar, Kalsel, Kaltara, Kaltim, Kalteng, Sulut, Gorontalo, Sulteng, Sulbar, Sulse, Sultra, Maluku, Papua Barat, Papua
		Penyiapan dan Pemberian akses kelola kawasan hutan untuk masyarakat dalam bentuk Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat dan kemitraan	330.000 ha	2.000.000 ha	PSKL	33 Provinsi

Kegiatan Prioritas	Proyek Prioritas Nasional	Proyek Rincian K/L	Target		Program LH dan Kehutanan	Lokus
			2017	2018		
		Pemanfaatan di bawah tegakan hutan dalam bentuk agroforestry pada kegiatan HD, HKm, HTR, dan Hutan Rakyat	10.000 ha	140.000 ha	PSKL	33 Provinsi
		Pemberian bantuan alat ekonomi produktif perhutanan sosial (Hkm,HD,HTR, HR, Hutan Adat dan Kemitraan)	190 unit	400 unit	PSKL	33 Provinsi
		Penanganan konflik dan tenurial	270.000 ha	270.000 ha	PSKL	33 Provinsi
		Penyelenggaraan verifikasi Hutan Adat	25%	25%	PSKL	25 Provinsi
		Peningkatan kapasitas tenaga pendamping/ penyuluh handal		200 orang	P2SDM	
	Rehabilitasi kawasan perdesaan yang rusak dan tercemar lingkungan, terkena dampak bencana serta perubahan iklim	Pemulihan lahan gambut terdegradasi	2100 Hektar	3000 Hektar	PPKL	8 KHG

Strategi Kementerian LHK dalam mendukung Prioritas Nasional Pembangunan wilayah kegiatan prioritas perdesaan adalah dengan menyelesaikan penetapan kawasan hutan dan KPH, meningkatkan akses masyarakat dalam pemanfaatan potensi kawasan konservasi non taman nasional dan taman nasional, serta meningkatkan kerjasama KPH Produksi dengan masyarakat dalam pengelolaan hutan produksi, meningkatkan luas dan produksi komoditas HHBK di areal KPH Lindung, Meningkatkan kapasitas pengelolaan hutan lindung berbasis masyarakat setempat, pemberian akses masyarakat desa untuk mengelola hutan kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat, hutan desa dan kemitraan, penanganan konflik tenurial masyarakat dikawasan hutan, pemberian alat ekonomi produktif perhutanan sosial, dan Identifikasi, pemetaan seluruh kawasan hutan adat dan menetapkan pengelolaannya oleh masyarakat adat, meningkatkan kapasitas pelaku utama dan pelaku usaha dalam pemberdayaan masyarakat serta pemulihan ekosistem gambut dikawasan perdesaan. Adapun kinerja dari Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah sebagai berikut : Penyelesaian penetapan kawasan hutan 5% tambahan penetapan kawasan hutan, Fasilitasi rancangan tata hutan dan rancangan rencana pengelolaan hutan KPH 65 KPH, Pengelolaan kolaboratif hutan konservasi bersama masyarakat sekitar kawasan hutan konservasi non taman nasional 26 Desa, Pengelolaan kolaboratif hutan konservasi bersama masyarakat sekitar kawasan hutan konservasi di sekitar Taman Nasional 48 Desa, Pengelolaan hutan produksi (KPHP) untuk produksi barang dan jasa berbasis kemitraan dengan masyarakat desa 48 Desa, Pengelolaan hutan produksi (KPHP) untuk produksi barang dan jasa berbasis kemitraan dengan masyarakat desa 89 KPH Produksi, Pengembangan HHBK di Hutan Lindung 1000 Ha, Pengelolaan hutan lindung (KPHL) berbasis masyarakat desa setempat 80 KPHL, Penyiapan dan Pemberian akses kelola kawasan hutan untuk masyarakat dalam bentuk Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat dan kemitraan 2.000.000 ha, Pemanfaatan di bawah tegakan hutan dalam bentuk agroforestry pada kegiatan HD, HKm, HTR, dan Hutan Rakyat 400 unit, Pemberian bantuan alat ekonomi produktif perhutanan sosial

(Hkm,HD,HTR, HR, Hutan Adat dan Kemitraan) 400 unit, Penanganan konflik dan tenurial 270.000 ha, Penyelenggaraan verifikasi Hutan Adat 25%, Peningkatan kapasitas tenaga pendamping/penyuluh handal 200 orang, Pemulihan lahan gambut terdegradasi 3000 hektar.

PENGEMBANGAN WILAYAH (2) : PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA A.L KEBAKARAN HUTAN DAN PENGEMBANGAN WILAYAH (3) REFORMASI AGRARIA



PENGEMBANGAN WILAYAH (2) : PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA A.L KEBAKARAN HUTAN

Kegiatan Prioritas	Proyek Prioritas Nasional	Proyek Rincian K/L	TARGET		Program LH dan Kehutanan	Lokus
			2017	2018		
Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup Berkelanjutan termasuk Kawasan Rawan Bencana	Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Sarana Prasarana pengendalian kebakaran hutan konservasi non taman nasional	Maksimum 10.908 Ha	26 Unit Manajemen	KSDAE	26 UPT KSDA
		Sarana Prasarana pengendalian kebakaran hutan konservasi taman nasional	Maksimum 39.524 Ha	48 Unit Manajemen	KSDAE	48 UPT Taman Nasional
		Patroli Terpadu Pencegahan Karhutla di Wilayah Sumatera dan Kalimantan	300 Desa	731 Desa	PPI	Riau, Jambi, Sumsel, Kalbar, Kaltim, Kalteng, Kalsel, Kaltara
		Patroli Terpadu Pencegahan Karhutla di Wilayah Jawa, Bali, Nusra, Sulawesi dan Papua	50 Desa	50 Desa	PPI	Pulau Jawa, Bali, Nusra, Sulawesi dan Papua
		Pemadaman kebakaran hutan dan lahan melalui Darat	-	5000 Hari Ops Dam	PPI	Riau, Jambi, Sumsel, Kalbar, Kaltim, Kalteng, Kalsel, Kaltara
		Pemadaman kebakaran hutan dan lahan melalui Udara	1 Keg	1 Keg	PPI	Riau, Jambi, Sumsel, Kalbar, Kaltim, Kalteng, Kalsel, Kaltara
		Pelaksanaan restorasi gambut	-	400.000 Ha	PPKL	Jambi, Sumatera Selatan, Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Papua
Rehabilitasi hutan dan lahan pada Daerah Aliran Sungai rawan bencana	Rehabilitasi hutan dan lahan kritis pada DAS rawan/pasca bencana secara vegetatif	-	16.800 Ha	PDASHL	Hutan Mangrove pada kawasan hutan (500 ha):	

Kegiatan Prioritas	Proyek Prioritas Nasional	Proyek Rincian K/L	TARGET		Program LH dan Kehutanan	Lokus
			2017	2018		
		Rehabilitasi hutan dan lahan rawan/pasca bencana secara sipil teknis	10.600 Unit	3.500 Unit	PDASHL	5 DAS : DAS Hulu Cimanuk (Jabar), DAS Citarum Hulu (Jabar), DAS Sari (NTB), DAS Garang (Jateng), DAS Tamiang (Aceh)
		Pembuatan Hutan kota	500 Ha	500 Ha	PDASHL	Wilker BPDAS : DAS Krueng (Banda Aceh), DAS Wampu Sei Ular (Medan, Tebing Tinggi), DAS Agam Kuantan (Padang), DAS Indragiri Rokan (Pekanbaru), DAS Musi (Prabumulih, Palembang, Lubuklinggau), DAS Cimanuk (Bandung), DAS Pemali Jratun (Semarang), DAS Kapuas (Pontianak), DAS Kahayan (Palangkaraya), DAS Mahakam Berau (Samarinda), DAS Barito (Banjarbaru), DAS Dodokan (Mataram), DAS Benain Noelmina (Kupang), DAS Bone Bolango (Gorontalo), DAS Tondano (Mendo), DAS Jeneberang (Makassar), DAS Sampara (Kendari), DAS Remu (Manokwari), DAS Memberano (Jayapura), DAS Baturusa (Pangkal Pinang)
		Pembangunan Kebun Benih Semai/ Kebun Benih Klon/ Areal Sumber Daya Genetik (KBS/KBK/ASDG)	80 Ha	80 Ha	PDASHL	KPHL Banyuasin, Kabupaten Banyuasin, KHDTK BPK Aek Nauli, Kabupaten Simalungun, Areal Universitas Palangkaraya, Kota Palangkaraya, KHDTK Universitas Hasanuddin, Kabupaten Maros, Kabupaten Bone, KHDTK Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara, KPH Rarung, Kabupaten Lombok Tengah, Areal Universitas Pattimura, Kabupaten Seram Bagian Barat
Pemberdayaan Masyarakat	Pembentukan Masyarakat Tangguh Bencana pada Daerah Risiko Bencana Tinggi	Pembentukan dan Pembinaan Masyarakat Peduli Api (MPA) di wilayah provinsi rawan karhutla	300 Desa	300 Desa	PPI	Riau, Jambi, Sumsel, Kalbar, Kaltim, Kalteng, Kalsel, Kaltara, Papua Barat (3 Desa)
Sarana dan Prasarana Kebencanaan	Penyediaan Sistem Peringatan Dini	Fasilitasi pembentukan regu Brigdarkarhutla dan pembelian sarpras darkarhutla	1 Keg	10 KPH	PPI	Riau, Jambi, Sumsel, Kalbar, Kaltim, Kalteng, Kalsel, Kaltara

Strategi Kementerian LHK dalam mendukung Prioritas Nasional Pembangunan wilayah kegiatan prioritas pencegahan dan penanggulangan bencana (kebakaran hutan) adalah dengan perlindungan keanekaragaman hayati didalam kawasan konservasi non taman nasional dan taman nasional dari gangguan kebakaran hutan, menurunnya luas areal terbakar pada hutan/lahan gambut dan non gambut (mineral) di 7 provinsi rawan kebakaran hutan, terpulihkannya ekosistem gambut, meningkatnya tutupan lahan di 15 DAS prioritas, meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam upaya pencegahan kebakaran hutan, yang diterjemahkan kedalam kinerja peningaktan Sarana Prasarana pengendalian kebakaran hutan konservasi non taman nasional 26 Unit Manajemen, Sarana Prasarana pengendalian kebakaran hutan konservasi taman nasional 48 Unit Manajemen, Patroli Terpadu Pencegahan Karhutla di Wilayah Sumatera dan Kalimantan 731 Desa, Patroli Terpadu Pencegahan Karhutla di Wilayah Jawa, Bali, Nusra, Sulawesi dan Papua 50 Desa, Patroli Terpadu Pencegahan Karhutla di Wilayah Jawa, Bali, Nusra, Sulawesi dan Papua 5000 Hari Ops Dam, Pemadaman kebakaran hutan dan lahan melalui Udara 1 Keg, Pelaksanaan restorasi gambut 400.000 Ha, Rehabilitasi hutan dan lahan kritis pada DAS rawan/pasca bencana secara vegetative 16.800, Rehabilitasi hutan dan lahan rawan/pasca bencana secara sipil teknis Ha 3.500 Unit, Pembuatan Hutan kota 500 Ha, Pembangunan Kebun Benih Semai/ Kebun Benih Klon/ Areal Sumber Daya Genetik (KBS/KBK/ASDG) 80 Ha, Pembentukan dan Pembinaan Masyarakat Peduli Api (MPA) di wilayah provinsi rawan karhutla 300 Desa, Fasilitasi pembentukan regu Brigdarkarhutla dan pembelian

sarpras darkarhutla 300 desa, Fasilitasi pembentukan regu Brigdarkarhutla dan pembelian sarpras darkarhutla 10 KPH

PN PENGEMBANGAN WILAYAH (3) : REFORMA AGRARIA

Kegiatan Prioritas	Proyek Prioritas Nasional	Proyek Rincian K/L	TARGET		Program LH dan Kehutanan	Lokus
			2017	2018		
Penataan Penguasaan dan Pemilikan Tanah Obyek Reforma Agraria	Kawasan Hutan yang akan dilepaskan untuk Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA)	Pemuktahiran data dan peta TORA di kawasan hutan	0.00	26 provinsi	PKTL	Aceh, Bengkulu, Gorontalo, Jambi, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kep. Bangka Belitung, Kep. Riau, Maluku, Maluku Utara, NTB, NTT, Papua, Papua Barat, Riau, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Sumatera Utara
		Pemetaan pemukiman, fasum dan fasos dalam kawasan hutan	0.00	34 Provinsi	PKTL	34 provinsi: Aceh, Sumatera Utara, Riau, Kep. Riau, Jambi, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Lampung, Bengkulu, Bangka Belitung, Banten, Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Tengah, DI. Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, NTB, NTT, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat
		Inventarisasi dan verifikasi obyek TORA dalam kawasan hutan	0.00	147 Kabupaten	PKTL	Aceh, Bengkulu, Gorontalo, Jambi, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kep. Bangka Belitung, Kep. Riau, Maluku, Maluku Utara, NTB, NTT, Papua, Papua Barat, Riau, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Sumatera Utara
		Penataan batas kawasan hutan untuk penyelesaian TORA	0.00	58.942 km	PKTL	24 Provinsi (151 Kabupaten): Aceh (Aceh Singkil, Aceh Tamiang, Aceh Tenggara), Bengkulu (Kaur, Muko-muko, Seluma), Gorontalo (Bonebolango, Gorontalo), Jambi (Bungo, Kerinci, Merangin, Muarojambi, Sarolangun, Tanjung Jabung Barat, Tanjung Jabung Timur), Kalimantan Barat (Kapuas Hulu, Ketapang, Kota Singkawang, Kubu Raya, Landak, Melawi), Kalimantan Selatan (Banjar, Barito Kuala, HSS, HST, HSU, Banjarbaru, Kotabaru, Tabalong), Kalimantan Tengah (Barito Timur, Barito Utara, Gn Mas, Kapuas), Kalimantan Timur (Bontang, Kutai Barat, Kutai Timur), Kalimantan Utara (Malinau, Nunukan), Ke. Bangka Belitung (Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur), Maluku (Buru, Kepulauan Aru, Kota Tual, Maluku Barat Daya, Maluku Tengah), Maluku Utara (Halmahera Selatan, Halmahera Tengah, Halmahera Timur, Pulau Taliabu), Papua (Boven Digoel, Deiyai, Dogiyai, Intanjaya, Jayapura, Jayawijaya, Keerom, Kepulauan Yapen, Jayapura, Lannyjaya, Mamberamo Tengah, Mamberamo Raya, Mappi), Papua Barat (Maybrat, Pegunungan Arfak, Raja Ampat, Sorong, Sorong Selatan, Tambrau, Teluk Bintuni, Teluk Wondama), Riau (Indragiri Hilir, Indragiri Hilu, Kepulauan Meranti, Kota Dumia, Kuantan Singingi), Sulawesi Barat (Majene, Mamasa, Mamuju), Sulawesi Selatan (Barru, Bone, Bulukumba, Enrekang, Gowa, Jeneponto, Luwu, Luwu Timur), Sulawesi Tengah (Banggai Kepulauan, Buol, Donggala, Morowali, Morowali Utara, Parigi Moutong, Poso, Sigi), Sulawesi Tenggara (Bombana, Buton, Buton Utara, Kendari, Kolaka, Kolaka Timur, Kolaka Utara, Konawe, Konawe Kep., Konawe Selatan, Konawe Utara), Sulawesi Utara (Bolaang Mongondow, Bolaang Mongondow Selatan, Bolaang Mongondow Timur, Bolaang Mongondow Utara, Kep. Talaud, Minahasa, Minahasa Selatan, Minahasa Utara), Sumatera Barat (Dharmasraya, Kep. Mentawai, Kota Sawahlunto, Limapuluhkota, Padang Pariaman, Pasaman, Pasaman Barat, Pesisir Selatan), Sumatera Selatan (Muara Enim, Musi Bayuasin, Musi Rawas, Musi Rawas Utara, OKI, OKU Selatan, OKU Timur, Pali, Prabumulih), Sumatera Utara (Deli Serdang, Humbang Hasundutan, Karo, Labuhan Batu, Labuhan Batu Selatan, Labuhan Batu Utara, Langkat, Mandailing Natal, Nias, Nias Barat, Nias Selatan, Nias Utara, Padang Lawas, Padang Lawas Utara)
		Evaluasi kawasan hutan yang dilepaskan khususnya untuk perkebunan	0.00	22 provinsi	PKTL	22 provinsi.
		Penyelesaian perubahan kawasan hutan untuk TORA	0.00	1.613.972 Ha	PKTL	24 Provinsi (151 Kabupaten) ; Aceh (Aceh Singkil, Aceh Tamiang, Aceh Tenggara), Bengkulu (Kaur, Muko-muko, Seluma), Gorontalo (Bonebolango, Gorontalo), Jambi (Bungo, Kerinci, Merangin, Muarojambi, Sarolangun, Tanjung Jabung Barat, Tanjung Jabung Timur), Kalimantan Barat (Kapuas Hulu, Ketapang, Kota Singkawang, Kubu Raya, Landak, Melawi), Kalimantan Selatan (Banjar, Barito Kuala, HSS,

Kegiatan Prioritas	Proyek Prioritas Nasional	Proyek Rincian K/L	TARGET		Program LH dan Kehutanan	Lokus
			2017	2018		
						HST, HSU, Banjarbaru, Kotabaru, Tabalong), Kalimantan Tengah (Barito Timur, Barito Utara, Gn Mas, Kapuas), Kalimantan Timur (Bontang, Kutai Barat, Kutai Timur), Kalimantan Utara (Malinau, Nunukan), Ke. Bangka Belitung (Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur), Maluku (Buru, Kepulauan Aru, Kota Tual, Maluku Barat Daya, Maluku Tengah), Maluku Utara (Halmahera Selatan, Halmahera Tengah, Halmahera Timur, Pulau Taliabu), Papua (Boven Digoel, Deiyai, Dogiyai, Intanjaya, Jayapura, Jayawijaya, Keerom, Kepulauan Yapen, Jayapura, Lannyjaya, Mamberamo Tengah, Mamberamo Raya, Mappi), Papua Barat (Maybrat, Pegunungan Arfak, Raja Ampat, Sorong, Sorong Selatan, Tambrauw, Teluk Bintuni, Teluk Wondama), Riau (Indragiri Hilir, Indragiri Hulu, Kepulauan Meranti, Kota Dumai, Kuanta Sisingi), Sulawesi Barat (Majene, Mamasa, Mamuju), Sulawesi Selatan (Barru, Bone, Bulukumba, Enrekang, Gowa, Jeneponto, Luwu, Luwu Timur), Sulawesi Tengah (Banggai Kepulauan, Buol, Donggala, Morowali, Morowali Utara, Parigi Moutong, Poso, Sigi), Sulawesi Tenggara (Bombana, Buton, Buton Utara, Kendari, Kolaka, Kolaka Timur, Kolaka Utara, Konawe, Konawe Kep., Konawe Selatan, Konawe Utara), Sulawesi Utara (Bolaang Mongondow, Bolaang Mongondow Selatan, Bolaang Mongondow Timur, Bolaang Mongondow Utara, Kep. Talaud, Minahasa, Minahasa Selatan, Minahasa Utara), Sumatera Barat (Dharmasraya, Kep. Mentawai, Kota Sawahlunto, Limapuluhkota, Padang Pariaman, Pasaman, Pasaman Barat, Pesisir Selatan), Sumatera Selatan (Muaru Enim, Musi Bayuasin, Musi Rawas, Musi Rawas Utara, OKI, OKU Selatan, OKU Timur, Pali, Prabumulih), Sumatera Utara (Delit Serdang, Humbang Hasundutan, Karo, Labuhan Batu, Labuhan Batu Selatan, Labuhan Batu Utara, Langkat, Mandailing Natal, Nias, Nias Barat, Nias Selatan, Nias Utara, Padang Lawas, Padang Lawas Utara)

Strategi Kementerian LHK dalam mendukung Prioritas Nasional Pembangunan wilayah kegiatan prioritas reforma agraria adalah terselesaikannya penetapan kawasan hutan khususnya untuk TORA dengan kinerja Pemuktahiran data dan peta TORA di kawasan hutan 26 provinsi, Pemetaan pemukiman, fasum dan fasos dalam kawasan hutan 34 Provinsi, Inventarisasi dan verifikasi obyek TORA dalam kawasan hutan 147 Kabupaten, Penataan batas kawasan hutan untuk penyelesaian TORA 58.942 km, Evaluasi kawasan hutan yang dilepaskan khususnya untuk perkebunan 22 provinsi, Penyelesaian perubahan kawasan hutan untuk TORA 1.613.972 Ha.

9. PRIORITAS NASIONAL POLITIK, HUKUM, DAN PERTAHANAN KEAMANAN



PN POLITIK, HUKUM, DAN PERTAHANAN KEAMANAN : REFORMASI BIROKRASI

Kegiatan Prioritas	Proyek Prioritas Nasional	Proyek Rincian K/L	TARGET		Program LH dan Kehutanan	Lokus
			2017	2018		
Penguatan Implementasi Standar Pelayanan Publik dan Kapasitas SDM Pelayanan	Penyelesaian laporan pengaduan masyarakat	Penanganan pengaduan masyarakat	20 Dumas	20 Dumas	Itjen	Pusat
Peningkatan Integritas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi	Penguatan kapasitas dan pemenuhan 17 standarisasi pada 610 LPSE	Penguatan kapasitas dan pemenuhan standarisasi pada di LPSE KLHK	-	6 standarisasi	Setjen	Pusat
Perluasan Implementasi e-Government yang terintegrasi	Penguatan Sistem Monev-Next Generation online PBJ seluruh K/L/D yang terintegrasi dengan RENJA dan RKA K/L	Peningkatan pelayanan PPID berdasarkan nilai KIP	-	82,5 poin	Setjen	Pusat

Strategi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam Prioritas Nasional Politik, Hukum dan Pertahanan Keamanan Kegiatan Prioritas Reformasi Birokrasi adalah dengan penanganan pengaduan dukungan masyarakat (dumas), penyelenggaraan ketatausahaan kerumahtanggaan dan pengelolaan perlengkapan secara transparan, penyiaran dan penyebarluasan informasi pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan dengan intens, dengan kinerja Penanganan pengaduan masyarakat 20 dumas, Penguatan kapasitas dan pemenuhan standarisasi pada di LPSE KLHK 6 standarisasi, Peningkatan pelayanan PPID berdasarkan nilai KIP 82,5 poin.

PN POLITIK, HUKUM, DAN PERTAHANAN KEAMANAN : KEPASTIAN HUKUM

Kegiatan Prioritas	Proyek Prioritas Nasional	Proyek Rincian K/L	TARGET		Program LH dan Kehutanan	Lokus
			2017	2018		
Penegakan Hukum yang Berkualitas	Penegakan Hukum di Bidang Sumber Daya Alam	Penegakan Hukum Perdata Pemanfaatan SDA	-	10 gugatan	PHLHK	Riau, Jambi, Kalteng, Kaltim, Kalsel, Jabar, Sumut, Sumbar, Bengkulu, Sulut, Banten
		Pengawasan Penanggungjawab Usaha/Kegiatan dalam Pemanfaatan SDA	-	60% (1000 Izin)	PHLHK	Pusat
		Penegakan Hukum Administrasi Pemanfaatan SDA	-	70% (200 SA)	PHLHK	Pusat
		Penegakan Hukum Pidana Pemanfaatan SDA	75	75% P21 (100 Kasus)	PHLHK	Pusat
		Pencegahan Tindak Pidana Kehutanan dan Pengamanan Kawasan Hutan dan Peredaran Hasil Hutan	400.000 Ha	5.000.000 Ha	PHLHK	Pusat
		Penyediaan Sarana dan Prasarana gakum Bidang SDA	-	2500 orang (Polhut, PPNS, PPLH)	PHLHK	Pusat

Strategi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam Prioritas Nasional Politik, Hukum dan Pertahanan Keamanan Kegiatan Prioritas Kepastian hukum adalah optimalisasi upaya penyelesaian sengketa bidang LHK, optimalisasi upaya penanganan pengaduan, pengawasan izin lingkungan, izin PPLH dan PUU dan ketaatan terhadap sanksi administrasi, meningkatnya jumlah kasus pidana LHK yang ditangani oleh PPNS LHK secara profesional, peningkatan kapasitas dan sarana prasarana PPNS dengan kinerja Penegakan Hukum Perdata Pemanfaatan SDA 10 gugatan, Pengawasan Penanggungjawab Usaha/Kegiatan dalam Pemanfaatan SDA 60% (1000 Izin, Penegakan Hukum Administrasi Pemanfaatan SDA 70% (200 SA), Penegakan Hukum Pidana Pemanfaatan SDA 75% P21 (100 Kasus), Pencegahan Tindak Pidana Kehutanan dan Pengamanan Kawasan Hutan dan Peredaran Hasil Hutan 5.000.000 Ha, Penyediaan Sarana dan Prasarana gakum Bidang SDA 2500 orang (Polhut, PPNS, PPLH).

III. Alokasi Anggaran dan Evaluasi Keberhasilan

Pelaksanaan pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan memerlukan sumberdaya dan anggaran yang memadai dalam mencapai target sesuai dengan yang telah direncanakan. Sinergitas dalam prioritas pembangunan nasional, diharapkan dapat mendorong pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan tahun 2018 dan memastikan kondisi lingkungan berada pada toleransi yang dibutuhkan untuk kehidupan manusia dan sumberdaya pada rentang populasi yang aman. Produktivitas tapak lingkungan dan hutan untuk menghasilkan barang dan jasa juga merupakan hal yang penting untuk lebih meningkatkan kontribusi terhadap perekonomian nasional. Pembangun sentra-sentra produksi hasil hutan diharapkan dapat memicu pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja, investasi, pengentasan kemiskinan dan mengurangi kesenjangan sosial.

Dalam mengevaluasi pelaksanaan seluruh program Lingkungan Hidup dan Kehutanan, melalui tercapainya indikator kinerja sasaran strategis yang telah ditetapkan, memberikan gambaran peranan lingkungan hidup dan kehutanan terhadap prioritas pembangunan nasional, sehingga upaya untuk mendorong keterkaitan antara program terus dilaksanakan, dimana keberhasilan satu program akan meningkatkan keberhasilan program lainnya, dan sebaliknya kegagalan salah satu program juga akan menurunkan capaian keberhasilan program lainnya. Dengan demikian sinergitas dalam pelaksanaan kegiatan sangat diperlukan dalam mendukung keberhasilan pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan.

Sasaran Strategis 2015-2019	Indikator Kinerja Sasaran Strategis 2018	Alokasi 2018 (Rp. Milyar)
Menjaga kualitas LH untuk meningkatkan daya dukung lingkungan, ketahanan air dan kesehatan masyarakat	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 65 – 66,5	1.247,8
Memanfaatkan potensi sumberdaya hutan dan lingkungan hidup secara lestari untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan	Jumlah PNBP sebesar Rp. 3,7 Trilyun	733,7
	Nilai ekspor hasil hutan sebesar Rp. 8,64 milyar dan Rp. 5,6 Trilyun	
Melestariakan keseimbangan ekosistem dan keanekaragaman hayati serta keberadaan sumberdaya alam sebagai sistem penyangga kehidupan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan	Jumlah kumulatif kawasan konservasi yang memiliki nilai efektivitas minimal 70 sebanyak 150 Unit	3.903,4
	Jumlah kumulatif kesatuan pengelolaan hutan (KPH) yang memproduksi barang dan jasa secara lestari desa 209 unit	
	Luas kumulatif kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat dan dikembangkan sebagai sentra produksi hasil hutan berbasis desa 10,16 juta ha	
	Jumlah provinsi yang mampu dilindungi dari bahaya kebakaran hutan sebanyak 7 provinsi	
TOTAL		5.884,9

Pemenuhan kinerja Lingkungan Hidup dan kehutanan sampai dengan tahun 2016 merupakan rangkaian dari pemenuhan kinerja dari jangka menengah periode tahun 2015-2019 yang tertuang dalam Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dari capaian kinerja yang terekam, maka tahun 2017 -2019 ini masih banyak pencapaian kinerja yang perlu didorong dengan memanfaatkan alokasi anggaran yang sudah ditetapkan dengan penekanan pada prioritas nasional.

Dimana pencapaian secara holistik, integratif dengan spasial dan lebih terencana, dan diupayakan untuk mendorong pencapaian kinerja jangka menengah 2015-2019.

INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP

Sepanjang tahun 2016, indeks kualitas lingkungan hidup berhasil dipertahankan sebesar 62,96, yang merupakan agregasi dari pengukuran Indeks kualitas air (50,20), Indeks Kualitas Udara (81,78) dan indeks tutupan lahan (58,42), dengan perbandingan agregasi air 30%, udara 30% dan tutupan lahan 40%.

Pembangunan nasional yang dilaksanakan tentunya membawa tekanan terhadap lingkungan hidup. Pembangunan infrastruktur bendungan , dimana 85 unit berada dikawasan hutan, perluasan sawah 1 juta ha, serta distribusi dan legalisasi aset tanah 4,1 juta ha diimbangi dengan pengelolaan sampah pengelolaan sampah di 355 kabupaten/kota, mempertahankan tutupan hutan untuk menunda ijin di hutan alam 66,4 juta ha, rehabilitasi hutan dan lahan 179,4 ribu ha, perbaikan proses industri (diantaranya penurunan beban air limbah 3,5 juta ton, efisiensi air 447,4 juta m³, pemanfaatan kembali limbah padat non B₃ 3,2 juta ton dan efisiensi energi 249 juta giga joule) dan pengawasan secara berkala industri di 231 pemegang ijin usaha industri, sehingga indeks kualitas lingkungan hidup diupayakan dapat terus dipertahankan ditengah upaya pembangunan nasional.

Pengelolaan sampah dari 250 juta penduduk Indonesia sampai dengan Bulan Juli 2017 sebesar 50,45 juta ton sampah dari 64 juta ton sampah per tahun. Sedangkan pengelolaan limbah B3 sebesar 319,59 juta ha, dan pengelolaan B3 sebesar 1,79 juta ha.

PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

Dari sisi penerimaan negara bukan pajak, sumbangan terbesar diperoleh dari produksi kayu bulat, terutama dari ijin usaha hutan alam, hutan tanaman dan Perhutani. Produksi kayu bulat pada tahun 2016 sebesar 38,32 juta m³. sedangkan pendapatan kehutanan (4214) sebesar Rp.2,39 trilyun, dari produksi kayu bulat, pemanfaatan kawasan hutan untuk air dan energi air (di dalamnya termasuk mikrohidro), serta penggunaan kawasan hutan di luar kepentingan kehutanan.

Untuk mengurangi kesenjangan perekonomian antara masyarakat kota dan desa, peningkatan kunjungan wisata ke Taman Nasional terus diupayakan di bidang jasa-jasa wisata alam antara lain jasa transportasi, jasa pemandu, jasa penyediaan makanan/minuman, jasa penyediaan cendera mata serta industri kreatif lainnya. Sampai dengan tahun 2016 sejumlah 8,172 juta wisman dengann perincian 482 ribu wisatawan mancanegara, dan 7,69 juta wisatawan domestik. Komponen ini termasuk dalam MAP 4237 (pendapatan iuran dan denda).

Realisasi penerimaan negara bukan pajak tahun 2016 (per 31 Desember 2016) sebesar Rp.4,52 triliun dari rencana Rp.3,4 triliun (atau 132,94%). Pendapatan Kehutanan (kode Mata Anggaran Penerimaan, MAP 4214) masih menyumbang penerimaan terbesar (Rp.3,70 triliun), diikuti pendapatan bunga (4233) sebesar Rp.328,5 milyar dan pendapatan iuran dan denda (4237) sebesar Rp.253,98 milyar.

EKSPOR HASIL HUTAN

Ekspor hasil hutan didukung dari aktivitas ekspor hasil hutan yang berasal dari kayu olahan dan perdagangan tumbuhan dan satwa liar. Nilai ekspor hasil hutan dari kayu olahan sebesar US\$9,2 milyar (dari rencana US\$7,4 milyar). Nilai pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar sebesar Rp.6,5 triliun dari rencana Rp.5,3 triliun.

Proporsi wilayah paling tinggi tujuan ekspor kayu olahan terbesar ke wilayah Asia (71%), berikutnya adalah Amerika Utara (11%) dan Uni Eropa (9%). Sedangkan tujuan ekspor untuk tumbuhan dan satwa liar, tersebar ke berbagai negara sesuai komoditasnya. Untuk Amphibi, negara tujuan ekspor terbesar adalah Amerika, Republik Korea dan Belanda. Arthropoda adalah Singapura, Jerman dan China. Buaya ke negara Hongkong, Jepang dan Thailand. Burung ke Hongkong, Singapura dan Amerika. Gaharu ke Saudi Arabia, Singapura dan Taiwan. Koral ke Amerika, Jerman dan Inggris. Mamalia ke Taiwan, Amerika dan Italia. Moluska ke negara Amerika, Prancis dan Belanda. Sedangkan Reptilia ke China, Singapura dan Italia.

KAWASAN KONSERVASI DENGAN NILAI METT MINIMAL 70

Nilai METT kawasan konservasi adalah nilai yang menggambarkan kemajuan efektifitas pengelolaan kawasan bagi kepentingan manajemen secara adaptif dan untuk memberikan gambaran secara cepat mengenai kemajuan dalam upaya meningkatkan efektifitas pengelolaan dalam kawasan konservasi.

Yang paling mempengaruhi nilai efektifitas adalah batas kawasan konservasi yang masih dalam proses sehingga mempengaruhi nilai efektifitas pengelolaan kawasan konservasi. Penggunaan kawasan konservasi untuk tujuan lain (kebun, tambang, fasilitas umum dan fasilitas khusus) juga mempengaruhi nilai METT kawasan konservasi. Sehingga tahun 2016 jumlah kawasan konservasi yang memiliki nilai METT minimal 70 adalah 40 unit. Angka ini berada di bawah target tahun 2016 sebesar 100 unit.

Pemanfaatan kawasan konservasi untuk tujuan lain tercatat sebanyak 265 ribu ha dan 377,40 km. Perkebunan sawit seluas 160,9 ribu ha, ladang kopi-cengkeh-hortikultura seluas 85,1 ribu ha, perkampungan beserta fasilitas sosial dan fasilitas umum (rumah ibadah, puskesmas, kantor desa) seluas 9.471,76 ha dan pembangunan strategis non prosedural (jalan, menara listrik dan telekomunikasi, dermaga) seluas 9.729,06 ha dan 377,4 km.

Kondisi yang sama juga terdapat pada pertambangan ilegal. Penambangan emas tanpa ijin sebanyak 728,02 ha, terdapat diantaranya di Taman Nasional Lore Lindu, Bukit Baka Bukit Raya, Manusela, Tanjung Puting, Gunung Halimun Salak dan Aketajawe Lolobata. Penambangan lainnya berupa batu-pasir-mineral logam

terserak di Taman Nasional Gunung Palung, Aketajawe Lolobata dan kawasan konservasi lainnya di Sumatera Selatan dan Jawa Barat.

KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN YANG MEMPRODUKSI BARANG DAN JASA

Selama tahun 2016 sebanyak 135 kesatuan pengelolaan hutan berhasil dibentuk. Terdiri atas 111 kesatuan pengelolaan hutan produksi dan 24 kesatuan pengelolaan hutan lindung. Dari rencana 149 unit, kinerja tahun 2016 sebesar 90,60%. Pemanfaatan hasil hutan di kesatuan pengelolaan hutan didorong oleh hasil-hasil penelitian dan pengembangan yang pelaksanaannya didampingi oleh penyuluh dan tenaga bakti rimbawan yang berperan dalam memajukan kesatuan pengelolaan hutan, dalam menumbuhkan sentra produksi hasil hutan. Pemanfaatan kesatuan pengelolaan hutan terus diupayakan dalam mengembangkan hasil hutan bukan kayu dan wisata alam. Produk-produk Kesatuan

Pengelolaan Hutan antara lain minyak kepayang, cuka kayu, minyak kayu putih, minyak atsiri, sirup dan manisan pala.

KAWASAN HUTAN YANG DIKELOLA MASYARAKAT SEBAGAI SENTRA PRODUKSI HASIL HUTAN

Pada tahun 2016, kawasan hutan yang diakses oleh masyarakat seluas 309.777 ha. Terdiri atas 57.498 ha Hutan Kemasyarakatan, 177.687 ha Hutan Desa, 36.984 ha Hutan Tanaman Rakyat dan 13.409 ha hutan adat. Dari rencana 5,08 juta ha, kinerja tahun 2016 sebesar 6,10%.

Beberapa Komoditas madu hutan di Kabupaten Kapuas Hulu, Ujung Kulon, Teso Nilo dan Sumbawa yang berkerjasama dengan Oriflame mampu menembus pasar Eropa. Untuk hutan kemasyarakatan, HKM Kalibiru di Kabupaten Kulonprogo, Daerah Istimewa Yogyakarta menjual jasa lingkungan pariwisata pendapatan mencapai Rp. 267 Juta per bulan dan dapat mensejahterakan anggotanya.

Pemanfaatan Hutan Nagari Sungai Buluh sebagai sarana Ekowisata baru dimulai 8 Oktober 2016 namun jumlah pengunjung sudah mencapai 1.890 orang per bulan dengan pendapatan rata-rata Rp.18.100.000 per bulan, masyarakat juga memanfaatkan HHBK Rotan dan Kayu Ransam dengan omzet rata-rata Rp.1.000.000 per bulan. Selain ekowisata yang menjadi andalan dan produk HHBK yang meningkatkan nilai tambah, masyarakat desa Hutan Nagari Sungai Buluh juga memproduksi olahan makanan berupa nuget jamur tiram dari agroforestri dengan total pendapatan Rp.2.400.000 per bulan. Pola-pola kemitraan yang berkolaborasi dengan masyarakat mampu menciptakan hutan yang terjaga dan rakyat yang sejahtera.

Pencapaian kinerja sampai dengan Juni 2017, khususnya untuk meningkatkan akses legal masyarakat sekitar hutan dalam mengelola hutan, tercatat seluas 1,036 juta hektar lahan yang berhasil dikelola masyarakat dari target tahun 2017 sebesar 7,62 juta ha. Percepatan pemerataan ekonomi bagi masyarakat yang tidak memiliki lahan, dilakukan dengan penyediaan Tanah Obyek Reforma Agraria, sampai tahun 2017 telah teridentifikasi 4,8 juta hektar kawasan hutan sebagai obyek TORA dari target sampai tahun 2017 4,1 juta hektar. Sampai dengan Mei 2017 kawasan hutan yang telah diberikan kepada masyarakat seluas 707.346 hektar.

ROVINSI YANG DAPAT DILINDUNGI DARI BAHAYA KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN

Terjadi penurunan luas Kebakaran hutan dan lahan yang signifikan dari 2,6 juta hektar pada tahun 2015 menjadi hanya 0,43 juta hektar pada tahun 2016. Perbandingan jumlah hot spot sepanjang tahun 2016 hingga juni 2017, terjadi penurunan dari 3.915 titik berdasarkan satelit NOAA, sedangkan berdasarkan Satelit Terra/Aqua NASA terjadi penurunan 3.844 titik menjadi 157 titik.

Hasilnya pengukuran kinerja utama provinsi yang dapat dilindungi dari bahaya kebakaran hutan dan lahan menunjukkan angka sebesar 81,86%. Provinsi dengan nilai kinerja 99% adalah Jambi, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur, dengan intensitas terjadinya kebakaran adalah 1-2 bulan terjadi kebakaran hutan dan lahan dalam setahun. Kinerja berikutnya adalah 7-9 bulan dalam setahun terjadi kebakaran hutan dengan kinerja 69% adalah Sumatera Selatan, Riau dan Kalimantan Tengah. Selama delapan belas tahun berturut-turut kebakaran hutan dan lahan berulang pada tujuh provinsi yang sama, yakni : Sumatera Selatan, Jambi, Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur.

Rangkuman capaian sasaran strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan kehutanan sd. tahun 2016 disajikan pada tabel berikut :

Sasaran Strategis 2015-2019	Indikator Kinerja Sasaran Strategis Rencana 2016	Indikator Kinerja Sasaran Strategis Capaian Tahun 2016	Proporsi Capaian sd. tahun 2019
Menjaga kualitas LH untuk meningkatkan daya dukung lingkungan, ketahanan air dan kesehatan masyarakat	Indeks Kualitas Lingkungan 63,50	- 62,96 - 99,15% dari target 2016 - 1,88 point Menurun dibanding indeks kualitas lingkungan hidup tahun 2015	94,67% dari target 2019
Memanfaatkan potensi sumberdaya hutan dan lingkungan hidup secara lestari untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan	Jumlah PNBP sebesar Rp. 3,4 Trilyun	- Rp. 4,52 trilyun - 32,94% target kinerja 2016 - 18,15% Menurun dibanding PNBP tahun 2015	56,34% dari target 2019
	Nilai ekspor hasil hutan sebesar Us\$ 7,4 milyar kayu olahan	- US\$. 9,2 milyar capaian - 123,96% Kinerja 2016 - 5,89% Menurun dibanding ekspor kayu olahan tahun 2015	47,31% Dari target 2019
	dan Rp. 5,3 Trilyun Tumbuhan dan Satwa Liar	- Rp. 6,5 trilyun capaian - 130,95% Kinerja 2016 - 23,39% Meningkatkan dibanding ekspor pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar tahun 2015	43,69% dari target 2019

Sasaran Strategis 2015-2019	Indikator Kinerja Sasaran Strategis Rencana 2016	Indikator Kinerja Sasaran Strategis Capaian Tahun 2016	Proporsi Capaian sd. tahun 2019
Melestarikan keseimbangan ekosistem dan keanekaragaman hayati serta keberadaan sumberdaya alam sebagai sistem penyangga kehidupan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan	Jumlah kumulatif kawasan konservasi yang memiliki nilai efektivitas minimal 70 sebanyak 100 Unit	- 40 unit capaian - 40% Kinerja 2016 - 0% Angka capaian sampai dengan tahun 2015	15,38% Proporsi kumulatif pencapaian tahun 2015-2016 dengan rencana hingga 2019
	Jumlah kumulatif kesatuan pengelolaan hutan (KPH) yang memproduksi barang dan jasa secara lestari desa 149 unit	- 135 unit capaian - 90,60% Kinerja 2016 - 86,25% Meningkat dari tahun 2015	38,90% Proporsi kumulatif pencapaian tahun 2015-2016 dengan rencana hingga 2019
	Luas kumulatif kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat dan dikembangkan sebagai sentra produksi hasil hutan berbasis desa 5,08 juta ha	- 0,31 juta ha - 6,10 % kinerja 2016 - 63,15% meningkat dari tahun 2015	3,94% dari target 2019
	Jumlah provinsi yang mampu dilindungi dari bahaya kebakaran hutan sebanyak 7 provinsi	- 7 Provinsi capaian - 81,86% Kinerja 2016	81,86% dari target 2019

Alokasi Anggaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagian besar dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas nasional, dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional 2018 yaitu Memacu Investasi dan Infrastruktur untuk Pertumbuhan dan Pemerataan, dengan alokasi sebagaimana berikut :

No.	Prioritas Nasional	Alokasi 2018 (Rp. Milyar)
1	Pendidikan	64,5
2	Kesehatan	55,3
3	Perumahan dan Permukiman	36
4	Pengembangan Dunia Usaha dan Pariwisata	359,0
5	Ketahanan Energi	13,1
6	Ketahanan Pangan	279,3
7	Penanggulangan Kemiskinan	72,5
8	Pembangunan Wilayah	2.938,0
9	Politik, Hukum dan Pertahanan Keamanan	242,5
TOTAL		4.059,4

Alokasi anggaran yang mendukung pencapaian target 2018 sebagaimana surat Menteri Keuangan Nomor S-162/MK.2/2017 tanggal 10 Oktober 2017 perihal Penyampaian Pagu Alokasi Anggaran Kementerian/Lembaga TA 2018 Hasil Rapat Pembahasan Panitia Kerja Belanja Pemerintah Pusat Badan Anggaran DPR-RI dalam rangka Pembicaraan Tingkat I/ Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang APBN TA 2018 adalah sebagai berikut:

Program	Rp. (Milyar)
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian	573,9
Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Bidang Lingkungan	66,9
Program Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup dan Kehutanan	284,8
Program Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Dan Usaha Kehutanan	407,7
Program Pengendalian DAS dan Hutan Lindung	1.082,5
Program Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem	2.033,2
Program Planologi dan Tata Lingkungan	1.133,6
Program Peningkatan Penyuluhan dan Pengembangan SDM	325,9
Program Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan	416,0
Program Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan	372,6
Program Pengendalian Perubahan Iklim	320,4
Program Pengelolaan Sampah, Limbah dan B3	278,6
Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	729,4
Total	8.025,6

IV. Penutup

Kinerja pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang terangkum dalam prioritas nasional, memastikan intervensi secara langsung seluruh entitas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan diharapkan secara kumulatif bersama sektor-sektor lain menggerakkan pembangunan nasional. Komitmen untuk selalu mengawal secara terus menerus setiap konteks dari setiap kegiatan diharapkan dapat membawa perubahan secara nyata di tingkat tapak.

Komitmen untuk memenuhi kinerja yang telah dirumuskan, mendorong segala sumberdaya yang diamanatkan, bersama pemerintah daerah dan unsur masyarakat yang bergerak pada tataran lingkungan hidup dan kehutanan, membuat dokumen ini diharapkan dapat menjadi panduan dalam perumusan instrumen pelaksanaan pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan baik secara regulasi maupun penganggarannya.

V. LAMPIRAN

MATRIKS RENCANA DAN KEGIATAN TAHUN 2018 KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN *)

No.	Program/Kegiatan/Output	Target	Satuan	Alokasi (Juta Rupiah)	Lokasi	Kegiatan Prioritas	Program Prioritas	Prioritas Nasional
1	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian LHK			573.955,1	Pusat			
1	Koordinasi Kegiatan Perencanaan & Evaluasi			135.932,1				
	<i>Persentase capaian sasaran strategis Kementerian LHK</i>	93	%	71.579,3				
	<i>Nilai SAKIP KLHK Minimal A</i>	76	point	1.782,5				
	<i>Mekanisme pengelolaan dan penyaluran pendanaan pengurangan deforestasi dan degradasi hutan</i>	60	% dana tersalurkan	59.720,0				
	<i>Layanan internal (overhead)</i>	2	layanan	227,7				
	<i>Layanan Perkantoran</i>	12	layanan	2.622,5				
2	Penyelenggaraan Data dan Informasi KLHK			10.460,0				
	<i>Analisis IKLH</i>	1	IKLH	888,4				
	<i>Status Lingkungan Hidup Indonesia</i>	1	SLHI	888,5				
	<i>Sistem Informasi KLHK yang terbangun dan beroperasi</i>	1	sistem	888,5				
	<i>Satker yang memiliki struktur jaringan dan teknologi yang memenuhi standar minimal</i>	280	satker	5.945,9				
	<i>Daerah yang difasilitasi pembentukan Sistem Informasi LHK Daerah (SIL LHKD)</i>	15	daerah	888,7				
	<i>Layanan Perkantoran</i>	12	Bulan	960,0				
3	Penyelenggaraan Administrasi dan Penataan Kepegawaian KLHK			7.100,0				
	<i>Pegawai untuk memenuhi kebutuhan KPH sesuai analisis Kebutuhan RB</i>	3170	Orang	708,1				

No.	Program/Kegiatan/Output	Target	Satuan	Alokasi (Juta Rupiah)	Lokasi	Kegiatan Prioritas	Program Prioritas	Prioritas Nasional
	<i>Pegawai yang meningkat kompetensinya pada setiap jabatan</i>	9500	Orang	3.859,8				
	<i>Regulasi dan Pengangkatan Pejabat</i>	1	regulasi	175,0				
	<i>Nilai reformasi Birokrasi di 13 satker KLHK Pusat</i>	68	Nilai	857,1				
	<i>Layanan Perkantoran</i>	12	layanan	1.500,0				
4	Penyiaran dan Penyebarluasan Informasi Pembangunan LHK			13.721,2				
	<i>Kerjasama dengan Media Massa</i>	18	media massa	2.980,9				
	<i>Peningkatan nilai layanan PPIID berdasarkan nilai KIP</i>	82,5	point	4.100,0	Pusat	Perluasan Implementasi e-Government yang terintegrasi	Reformasi Birokrasi	Politik, Hukum, Dan Pertahanan Keamanan
	<i>Berita Positif</i>	3000	pemberitaan	4.619,1				
	<i>Layanan Perkantoran</i>	12	bulan	2.021,2				
5	Penyelenggaraan Ketatausahaan Kerumahtanggaan dan Pengelolaan Perlengkapan Kementerian LHK			240.475,3				
	<i>Penguatan kapasitas dan pemenuhan standarisasi pada di LPSE KLHK</i>	6	standarisasi	1.900,0	Pusat	Peningkatan Integritas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi	Reformasi Birokrasi	Politik, Hukum, Dan Pertahanan Keamanan
	<i>Jumlah manajemen aset</i>	328	satker	15.423,8				
	<i>Layanan internal (overhead)</i>	1	layanan	1.387,0				
	<i>Layanan umum</i>	1	layanan	33.814,4				
	<i>Layanan Perkantoran</i>	12	layanan	187.950,1				
6	Pembiayaan Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan			49.783,5				
	<i>Jumlah dana yang terdistribusi kepada mitra kerja KPH dan non KPH (HKM, HD, HR, dan hutan tanaman) serta investasi lingkungan</i>	0,4	T	48.333,5				
	<i>Jumlah Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)/ Pendapatan BLU Pusat P2H</i>	110	Milyar Rupiah	1.450,0				

No.	Program/Kegiatan/Output	Target	Satuan	Alokasi (Juta Rupiah)	Lokasi	Kegiatan Prioritas	Program Prioritas	Prioritas Nasional
7	Pembinaan dan Koordinasi Kerjasama Luar Negeri			6.930,0				
	<i>Kerjasama baru bilateral, regional, multilateral dan organisasi internasional non pemerintah yang mendukung pencapaian sasaran strategis</i>	6	<i>kerjasama baru</i>	741,1				
	<i>Kerjasama bilateral, regional, multilateral dan organisasi internasional non pemerintah terlaksana sesuai kepentingan nasional</i>	29	<i>Kerjasama baru</i>	4.188,9				
	<i>Layanan Perkantoran</i>	12	<i>layanan</i>	2.000,0				
8	Pengendalian Ekoregion Jawa			14.617,3				
	<i>Capaian sasaran strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Ekoregion Jawa 95%</i>	90	<i>%</i>	2.887,0				
	<i>Rencana pengelolaan pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan berbasis daya dukung dan daya tampung berdasarkan 8 isu strategis di Ekoregion Jawa selama 5 tahun</i>	6	<i>tematik (akumulasi)</i>	2.413,0				
	<i>Layanan Perkantoran</i>	12	<i>layanan</i>	9.317,3				
9	Pengendalian Ekoregion Bali-Nusra			14.531,0				
	<i>Capaian sasaran strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Ekoregion Bali Nusra 95%</i>	90	<i>%</i>	2.491,0				
	<i>Rencana pengelolaan pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan berbasis daya dukung dan daya tampung berdasarkan 8 isu strategis di Ekoregion Bali-Nusra selama 5 tahun</i>	6	<i>tematik(akumulasi)</i>	2.491,0				
	<i>Layanan Perkantoran</i>	12	<i>layanan</i>	9.549,0				
10	Pengendalian Ekoregion Kalimantan			12.154,3				
	<i>Capaian sasaran strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di</i>	90	<i>%</i>	2.887,0				

No.	Program/Kegiatan/Output	Target	Satuan	Alokasi (Juta Rupiah)	Lokasi	Kegiatan Prioritas	Program Prioritas	Prioritas Nasional
	<i>Ekoregion Kalimantan 95%</i>							
	<i>Rencana pengelolaan pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan berbasis daya dukung dan daya tampung berdasarkan 8 isu strategis di Ekoregion Kalimantan selama 5 tahun</i>	6	<i>tematik (akumulasi)</i>	1.935,0				
	<i>Layanan internal (overhead)</i>	1	<i>layanan</i>	160,0				
	<i>Layanan Perkantoran</i>	12	<i>layanan</i>	7.172,3				
11	Pengendalian Ekoregion Sulawesi dan Maluku			14.490,0				
	<i>Capaian sasaran strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Ekoregion Sulawesi dan Maluku 95%</i>	90	<i>%</i>	3.248,5				
	<i>Rencana Pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan berbasis daya dukung dan daya tampung berdasarkan 8 isu strategis di Ekoregion Sulawesi dan Maluku selama 5 tahun</i>	6	<i>tematik(akumulasi)</i>	2.028,0				
	<i>Layanan internal (overhead)</i>	1	<i>layanan</i>	23,5				
	<i>Layanan Perkantoran</i>	12	<i>layanan</i>	9.190,0				
12	Pengendalian Ekoregion Papua			12.042,5				
	<i>Capaian sasaran strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Ekoregion Papua 95%</i>	90	<i>%</i>	2.989,0				
	<i>Rencana pengelolaan pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan berbasis daya dukung dan daya tampung berdasarkan 8 isu strategis di Ekoregion Papua selama 5 tahun</i>	6	<i>tematik (akumulasi)</i>	2.890,0				
	<i>Layanan Perkantoran</i>	12	<i>layanan</i>	6.163,5				
13	Pengendalian Ekoregion Sumatera			15.983,2	15.983,201			
	<i>Capaian sasaran strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Ekoregion Sumatera 95%</i>	90	<i>%</i>	2.241,0				

No.	Program/Kegiatan/Output	Target	Satuan	Alokasi (Juta Rupiah)	Lokasi	Kegiatan Prioritas	Program Prioritas	Prioritas Nasional
	Rencana pengelolaan pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan berbasis daya dukung dan daya tampung berdasarkan 8 isu strategis di Ekoregion Sumatera selama 5 tahun	6	tematik (akumulasi)	2.741,0				
	Layanan Perkantoran	12	layanan	11.001,2				
14	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Kementerian LHK			7.813,8				
	Opini WTP untuk Laporan Keuangan	1	WTP	2.943,7				
	Peningkatan PNPB sebesar 10 persen dari penerimaan tahun 2013	12	Triliun Rupiah	1.356,3				
	Perusahaan yang menyelesaikan piutang negara bidang LHK	5	perusahaan	1.700,0				
	Layanan Perkantoran	12	layanan	1.813,8				
15	Pembinaan Standarisasi Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kehutanan			3.926,9				
	Rancangan Standar Nasional Indonesia dan Standar Nasional Indonesia harmonisasi, standar khusus (lingkup standar: sistem manajemen, produk, proses, metode uji/verifikasi, barang/jasa/teknologi ramah lingkungan)	15	rancangan	1.000,0				
	Penerapan SNI meningkat setiap tahun	25	SNI	1.612,0				
	Pemanfaatan barang dan jasa/teknologi ramah lingkungan meningkat	5	jenis	350,0				
	Jenis standar pelayanan masyarakat dalam penerapan pola konsumsi berkelanjutan ditetapkan	2	pelayanan	175,0				
	Layanan Perkantoran	12	layanan	789,9				
16	Pengembangan telaahan kebijakan, perundang-undangan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan			6.278,0				
	Terselesaikannya perkara perdata, TUN, uji materi dan pendampingan perkara pidana bidang LHK	80	perkara	800,0				

No.	Program/Kegiatan/Output	Target	Satuan	Alokasi (Juta Rupiah)	Lokasi	Kegiatan Prioritas	Program Prioritas	Prioritas Nasional
	Layanan internal (overhead)	2	layanan	434,0				
	Layanan hukum	2	layanan	3.300,0				
	Layanan Perkantoran	12	layanan	1.744,0				
17	Penyelenggaraan Kebijakan Strategis Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan			4.000,0				
	Jumlah rancangan kebijakan strategis	11	rancangan	3.455,0				
	Layanan internal (overhead)	1	layanan	45,0				
	Layanan Perkantoran	12	layanan	500,0				
18	Penyelenggaraan Keteknikan Lingkungan Hidup dan Kehutanan			3.716,1				
	Jumlah satker yang menerapkan NSPK baru/hasil evaluasi	168	satker	1.394,5				
	Jumlah satker UPT/KPH yang mendapatkan dukungan informasi teknologi keteknikan hutan dan lingkungan terdistribusi di 280 satker dan berfungsi baik sesuai NSPK	168	satker	1.356,3				
	Layanan Internal (Overhead)	1	layanan	49,2				
	Layanan Perkantoran	12	layanan	916,1				
II	Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan			66.990,2				
1	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Itjen Kementerian LHK			45.385,8				
	Rekomendasi hasil audit internal yang ditindaklanjuti secara tuntas	2000	saran	1.374,0				
	Tingkat Kematangan Implementasi SPIP	2	level	1.393,0				
	Tingkat Implementasi SAKIP Itjen	76	point	2.276,0				
	Tingkat kapabilitas APIP	2	level	1.332,3				
	Layanan Dukungan Manajemen Eselon I	94	layanan	3.977,2				
	Layanan Internal (Overhead)	4	layanan	302,0				
	Layanan Perkantoran	12	layanan	34.731,3				

No.	Program/Kegiatan/Output	Target	Satuan	Alokasi (Juta Rupiah)	Lokasi	Kegiatan Prioritas	Program Prioritas	Prioritas Nasional
2	Pengawasan yang Profesional Guna Menjamin Mutu Kinerja Kementerian LHK pada Wilayah Kerja Itwil I			3.813,4				
	<i>Layanan Audit Internal</i>	74	<i>layanan</i>	3.813,4				
3	Pengawasan yang Profesional Guna Menjamin Mutu Kinerja Kementerian LHK pada Wilayah Kerja Itwil II			3.679,2				
	<i>Layanan Audit Internal</i>	75	<i>layanan</i>	3.679,2				
4	Pengawasan yang Profesional Guna Menjamin Mutu Kinerja Kementerian LHK pada Wilayah Kerja Itwil III			5.004,1				
	<i>Layanan Audit Internal</i>	90	<i>layanan</i>	5.004,1				
5	Pengawasan yang Profesional Guna Menjamin Mutu Kinerja Kementerian LHK pada Wilayah Kerja Itwil IV			4.102,2				
	<i>Layanan Audit Internal</i>	81	<i>layanan</i>	4.102,2				
6	Pengawasan Terhadap Kasus Pelanggaran yang Berindikasi KKN			5.005,5				
	<i>Penanganan pengaduan masyarakat (Dumas)</i>	20	<i>Dumas</i>	2.000,0	<i>Pusat</i>	<i>Penguatan Implementasi Standar Pelayanan Publik dan Kapasitas SDM Pelayanan</i>	<i>Reformasi Birokrasi</i>	<i>Politik, Hukum, Dan Pertahanan Keamanan</i>
	<i>Rekomendasi Unit Kerja yang WBK (3 satker/tahun)</i>	3	<i>Rekomendasi</i>	820,0				
	<i>Layanan Audit Internal</i>	20	<i>layanan</i>	2.185,5				
III	Program Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup dan Kebutuhan			284.837,7				
1	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Litbang dan Inovasi (Setbadan Litbang dan Inovasi)			20.164,2				
	<i>Nilai capaian tata kelola pemerintahan yang baik Badan Litbang dan Inovasi</i>	82	<i>point SAKIP</i>	5.740,3				
	<i>Layanan Internal (Overhead)</i>	1	<i>layanan</i>	557,0				

No.	Program/Kegiatan/Output	Target	Satuan	Alokasi (Juta Rupiah)	Lokasi	Kegiatan Prioritas	Program Prioritas	Prioritas Nasional
	<i>Layanan Perkantoran</i>	12	<i>layanan</i>	13.866,9				
2	Penelitian dan Pengembangan Pengelolaan Hutan			33.405,0				
	<i>Capaian paket IPTEK dan persen kemanfaatan IPTEK bidang pengelolaan hutan</i>	6	<i>Sintesa</i>	2.971,6				
	<i>Rancangan Pengelolaan Stasiun Riset Terintegrasi di Taman Nasional</i>	2	<i>rancangan</i>	290,0				
	<i>Pengembangan Iptek LHK di KPH melalui Pilot Iptek</i>	5	<i>pilot iptek</i>	994,4				
	<i>Pengelolaan KHDTK dan Hutan Penelitian</i>	4	<i>KHDTK</i>	580,0				
	<i>Layanan Internal (Overhead)</i>	1	<i>layanan</i>	200,0				
	<i>Layanan Perkantoran</i>	12	<i>layanan</i>	28.369,0				
3	Penelitian dan Pengembangan Peningkatan Nilai Tambah Hasil Hutan			22.412,0				
	<i>Capaian IPTEK dan Persen Kemanfaatan IPTEK Bidang Peningkatan Nilai Tambah Hasil Hutan</i>	1	<i>sintesa</i>	2.755,5				
	<i>Pengembangan IPTEK LHK di KPH Melalui Pilot IPTEK</i>	1	<i>pilot IPTEK</i>	254,5				
	<i>Layanan Perkantoran</i>	12	<i>layanan</i>	19.402,0				
4	Penelitian dan Pengembangan Kualitas Lingkungan dan Pengelolaan Laboratorium Lingkungan			18.196,0				
	<i>Capaian paket IPTEK dan persen kemanfaatan IPTEK Bidang Kualitas Lingkungan dan Pengelolaan Laboratorium Lingkungan</i>	3	<i>Sintesa</i>	1.037,2				
	<i>Pengelolaan Laboratorium Rujukan Nasional</i>	1	<i>unit</i>	1.194,3				
	<i>Peningkatan kapasitas pengembangan laboratorium lingkungan di daerah pada 15 provinsi</i>	4	<i>provinsi</i>	340,0				
	<i>Pengembangan IPTEK LHK di KPH Melalui Pilot IPTEK</i>	1	<i>Pengembangan</i>	313,5				

No.	Program/Kegiatan/Output	Target	Satuan	Alokasi (Juta Rupiah)	Lokasi	Kegiatan Prioritas	Program Prioritas	Prioritas Nasional
	Layanan Internal (Overhead)	1	layanan	35,0				
	Layanan Perkantoran	12	layanan	15.276,0				
5	Penelitian dan Pengembangan Sosekjak dan Perubahan Iklim			24.174,0				
	Capaian paket IPTEK dan persen kemanfaatan IPTEK Bidang Pengelolaan Sosial, Ekonomi, Kebijakan dan Perubahan Iklim	3	Sintesa	1.553,1				
	Pengembangan IPTEK LHK di KPH Melalui Pilot IPTEK	1	Pilot IPTEK	10.563,9				
	Rekomendasi Kebijakan Bidang LHK	2	Rekomendasi	135,0				
	Layanan Internal (Overhead)	1	layanan	25,0				
	Layanan Perkantoran	12	layanan	11.897,0				
6	Pelaksanaan Kegiatan Penelitian Tematik Unit Litbang LHK di Daerah (15 Satker)			166.486,5				
	Bahan Sintesa Hasil Penelitian Terintegrasi di seluruh Satker, Balai Besar/ Balai sebanyak 75 paket	15	bahan sintesa	17.739,5				
	Pilot IPTEK Satker BLI di Daerah	15	Pilot IPTEK	3.037,3				
	Pengelolaan KHDTK dan Hutan Penelitian	30	KHDTK	2.052,2				
	Pengkajian dan Pengembangan Ekowisata Kawasan Hutan Aek Nauli	1	kajian	3.634,0	Pusat	Pengembangan Danau Toba	Pengembangan 3 Kawasan Pariwisata (dari 10)	Pengembangan Dunia Usaha Dan Pariwisata
	Layanan Internal (Overhead)	1	layanan	167,0				
	Layanan Perkantoran	12	layanan	139.856,5				
IV	Program Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Dan Usaha Kehutanan			407.691,4				
1	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PHPL			51.952,5				
	Tata kelola pemerintahan yang baik	82	poiN SAKIP	12.446,4				
	Layanan internal (overhead)	2	layanan	1.000,0				

No.	Program/Kegiatan/Output	Target	Satuan	Alokasi (Juta Rupiah)	Lokasi	Kegiatan Prioritas	Program Prioritas	Prioritas Nasional
	Layanan Perkantoran	12	layanan	38.506,1				
2	Peningkatan Perencanaan Pengelolaan Hutan Produksi			11.454,4				
	Luas Hutan Produksi yang Siap untuk dimanfaatkan untuk usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan Perhutanan Sosial	10	juta Ha	737,9				
	KPHP yang beroperasi di hutan produksi	209	KPHP	7.891,5				
	KPHP yang menerapkan prinsip pengelolaan hutan produksi lestari	5	KPHP	497,3				
	Unit manajemen yang memenuhi syarat untuk diberikan IUPHHK HA/RE/HTI di hutan produksi	8	unit	1.207,8				
	Layanan internal (overhead)			180,0				
	Layanan Perkantoran	12	layanan	940,0				
3	Peningkatan Usaha Hutan Produksi			5.416,2				
	Kayu bulat yang diproduksi dari hutan alam	5,9	juta m3	2.390,6				
	Kayu bulat yang diproduksi dari hutan tanaman	34	juta m3	880,2				
	Hutan di Kalimantan yang dibangun dengan Silvikultur Intensif	2	Ribu Ha	255,0				
	Usaha pemanfaatan hutan produksi untuk bioenergi	20	Ribu Ha	169,2				
	IUPHHK HA yang dievaluasi kinerjanya	15	unit	397,5				
	UPHHK-HT yang dievaluasi kinerjanya	20	unit	454,7				
	Layanan Perkantoran	12	layanan	869,0				
4	Peningkatan Tertib Penatausahaan Hasil Hutan dan Iuran Kehutanan pada Hutan Produksi			4.852,0				
	PNBP dari Hutan Produksi	2.958	Rupiah Triliun	1.003,5				
	Unit yang tertib penatausahaan hasil hutan dan iuran kehutanan	265	unit	3.033,5				
	Layanan Perkantoran	12	layanan	815,0				

No.	Program/Kegiatan/Output	Target	Satuan	Alokasi (Juta Rupiah)	Lokasi	Kegiatan Prioritas	Program Prioritas	Prioritas Nasional
5	Peningkatan Usaha Jasa Lingkungan Hutan Produksi dan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)			4.542,0				
	<i>Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Restorasi Ekosistem</i>	100.000	hektar	589,8				
	<i>Unit usaha jasa lingkungan/ jasa wisata di hutan produksi</i>	2	unit	1.927,2				
	<i>Komoditas HHBK yang diproduksi di hutan produksi</i>	261.000	ton	1.287,1				
	<i>Layanan internal (overhead)</i>	0	bulan	80,0				
	<i>Layanan Perkantoran</i>	12	layanan	658,0				
6	Peningkatan Usaha Industri Kehutanan			12.437,5				
	<i>Produk kayu olahan yang berasal dari IUPHHK yang bersertifikat legalitas kayu</i>	30	juta m3	178,4				
	<i>Roadmap/kajian pengembangan Forest Based Cluster industry</i>	4	unit	685,5				
	<i>Investasi industri kehutanan</i>	1000	Miliar Rupiah	132,0				
	<i>Industri Primer Hasil Hutan yang menggunakan sistem pengendalian bahan baku online</i>	1096	unit	1.816,6				
	<i>Ekspor Produk Industri Kehutanan</i>	8,64	USD Miliar	1.390,0				
	<i>UMKM yang difasilitasi Sertifikasi SVLK</i>	150	Kelompok	7.500,0	Pusat	Peningkatan Kualitas Produk dan Akses Pemasaran	Perluasan Akses Usaha Mikro, Kecil, dan Koperasi	Penanggulangan Kemiskinan
	<i>Layanan Perkantoran</i>	12	layanan	735,0				
7	Pembinaan Pengelolaan Hutan Produksi dan Industri Hasil Hutan			317.036,7				
	<i>KPHP yang dapat dilindungi dari ancaman kebakaran</i>	92	KPHP	20.600,0				
	<i>KPHP yang dapat dilindungi dari gangguan dan konflik keamanan hutan</i>	206	KPHP	53.231,7				

No.	Program/Kegiatan/Output	Target	Satuan	Alokasi (Juta Rupiah)	Lokasi	Kegiatan Prioritas	Program Prioritas	Prioritas Nasional
	<i>Pengelolaan hutan produksi (KPHP) untuk produksi barang dan jasa berbasis kemitraan dengan masyarakat</i>	89	KPHP	132.000,0	Pusat	Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa dan Kawasan termasuk Kawasan Transmigrasi dan Sumber Daya Hutan	Pembangunan Perdesaan	Pembangunan Wilayah
	<i>Data dan informasi hutan produksi</i>	16	wilayah	3.446,5				
	<i>Produksi dan Kinerja usaha pemanfaatan hasil hutan</i>	16	wilayah	8.529,4				
	<i>Data dan informasi penatausahaan hasil hutan dan iuran kehutanan</i>	16	wilayah	3.540,9				
	<i>Data dan informasi industri primer hasil hutan</i>	16	wilayah	2.071,4				
	<i>Promoting Sustainable Community Based Natural Resources Management and Institutional Development Project, Forest Investment Program (FIP) II</i>	10	Unit	6.091,3				
	<i>Community Focus Investment Address Deforestation And Forest Degradation Project Forest Investment Program (FIP) I</i>	2	Unit	103,0				
	<i>Layanan internal (overhead)</i>			2.640,9				
	<i>Layanan Perkantoran</i>	12	layanan	84.781,7				
V	Program Pengendalian DAS dan Hutan Lindung			1.082.474,2				
1	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PDASHL (Setditjen PDASHL)			53.578,7				
	<i>Tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Ditjen PDASHL dalam kerangka reformasi birokrasi untuk menjamin kinerja yang optimal. SAKIP dengan nilai minimal 76,00 (A) di tahun 2018</i>	76	Poin SAKIP	24.949,1				
	<i>Layanan Perkantoran</i>	12	layanan	28.629,6				
2	Pembinaan Rehabilitasi dan reklamasi Hutan, Rehabilitasi lahan serta Konservasi tanah dan Air			16.255,5				

No.	Program/Kegiatan/Output	Target	Satuan	Alokasi (Juta Rupiah)	Lokasi	Kegiatan Prioritas	Program Prioritas	Prioritas Nasional
	<i>Pembinaan kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan kritis secara vegetatif untuk ketahanan pangan dan rawan/pasca bencana</i>	25.300	Ha	4.329,7				
	<i>Pembinaan kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan kritis secara sipil teknis untuk ketahanan pangan dan rawan/pasca bencana</i>	3.392	unit	386,3				
	<i>Pembinaan Forest Programme II (Development of Integrated Biodiversity Conservation and Watershed Management)</i>	1	Kegiatan	10.439,5				
	<i>Layanan Perkantoran</i>	12	layanan	1.100,0				
3	<i>Pembinaan Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung</i>			4.670,0				
	<i>Jumlah KPHL yang beroperasi</i>	80	KPH	3.570,0				
	<i>Layanan Perkantoran</i>	12	layanan	1.100,0				
4	<i>Pembinaan Penyelenggaraan Pengelolaan DAS</i>			4.555,0				
	<i>Jumlah RPDAST yang diinternalisasi ke dalam RTRW</i>	80	RPDAST	1.400,0				
	<i>Rencana dan Evaluasi Pengendalian DAS</i>	34	provinsi	2.055,0				
	<i>Layanan Perkantoran</i>	12	layanan	1.100,0				
5	<i>Pembinaan Pengembangan Perbenihan Tanaman Hutan</i>			4.864,4				
	<i>Sumber benih berkualitas dan ASDG</i>	80	Ha	1.000,0				
	<i>Jumlah bibit berkualitas yang disediakan dan didistribusikan</i>	50	juta batang	301,0				
	<i>Jumlah bibit produktif</i>	2,5	juta batang	200,0				
	<i>Sumber benih terkelola</i>	10500	Ha	2.234,4				
	<i>Layanan Perkantoran</i>	12	layanan	1.129,0				
6	<i>Pembinaan Pengendalian Kerusakan Perairan Darat</i>			4.315,7				
	<i>Jumlah danau yang ditingkatkan kualitas airnya</i>	15	danau	3.215,7				
	<i>Layanan Perkantoran</i>	12	layanan	1.100,0				

No.	Program/Kegiatan/Output	Target	Satuan	Alokasi (Juta Rupiah)	Lokasi	Kegiatan Prioritas	Program Prioritas	Prioritas Nasional
7	<i>Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan, Rehabilitasi Lahan, Perencanaan DAS, serta Pengendalian Kerusakan Perairan Darat</i>			973.816,1				
	<i>Rehabilitasi hutan dan lahan kritis pada DAS Rawan/Pasca Bencana secara vegetatif</i>	16800	Ha	306.916,5	Pusat	<i>Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Berkelanjutan termasuk di Kawasan Rawan Bencana</i>	<i>Pencegahan dan Penanggulangan Bencana (a.l Kebakaran Hutan)</i>	<i>Pembangunan Wilayah</i>
	<i>Rehabilitasi hutan dan lahan rawan/pasca bencana secara sipil teknis</i>	2477	unit	36.580,0	Pusat	<i>Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Berkelanjutan termasuk di Kawasan Rawan Bencana</i>	<i>Pencegahan dan Penanggulangan Bencana (a.l Kebakaran Hutan)</i>	<i>Pembangunan Wilayah</i>
	<i>Data Kinerja DAS</i>	34	DAS	34,0				
	<i>Jumlah KPHL yang beroperasi</i>	80	KPH	58.000,0	Pusat	<i>Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa dan Kawasan termasuk Kawasan Transmigrasi dan Sumber Daya Hutan</i>	<i>Pembangunan Perdesaan</i>	<i>Pembangunan Wilayah</i>

No.	Program/Kegiatan/Output	Target	Satuan	Alokasi (Juta Rupiah)	Lokasi	Kegiatan Prioritas	Program Prioritas	Prioritas Nasional
	Pengembangan HHBK di Hutan Lindung	1000	Ha	18.000,0	Pusat	Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa dan Kawasan termasuk Kawasan Transmigrasi dan Sumber Daya Hutan	Pembangunan Perdesaan	Pembangunan Wilayah
	Tersedianya bibit berkualitas	46	juta batang	69.000,0	Pusat	Pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi	Pembangunan Sarana dan Prasarana Pertanian (termasuk irigasi)	Ketahanan Pangan
	Data Hutan Rakyat	20	juta M3	34,0				
	Penyediaan bibit produktif	2,5	juta batang	43.750,0	Pusat	Pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi	Pembangunan Sarana dan Prasarana Pertanian (termasuk irigasi)	Ketahanan Pangan
	Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis di DAS yang mendukung Ketahanan Pangan	8500	Ha	144.871,6	Pusat	Pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi	Pembangunan Sarana dan Prasarana Pertanian (termasuk irigasi)	Ketahanan Pangan
	Pembuatan Bangunan KTA Yang Mendukung Ketahanan Pangan (DPI, DPn, dan Gully Plug)	915	unit	15.678,1	Pusat	Pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi	Pembangunan Sarana dan Prasarana Pertanian (termasuk irigasi)	Ketahanan Pangan

No.	Program/Kegiatan/Output	Target	Satuan	Alokasi (Juta Rupiah)	Lokasi	Kegiatan Prioritas	Program Prioritas	Prioritas Nasional
	Internalisasi RPDAS dalam RTRW	80	RPDAST	80,0				
	Pemantauan Kualitas Air Danau/Sungai/Mata Air dan Air Tanah	15	Lokasi	30,0				
	Forest Programme II (Development of Integrated Biodiversity Conservation and Watershed Management) Jambi	1	Kegiatan	19.810,5				
	Forest Programme III (BPDASHL Palu-Poso)	1	Kegiatan	6.152,4				
	Jumlah sumur resapan air yang terbangun di 15 DAS Prioritas	6000	unit	35.000,0	Pusat	Peningkatan Ketersediaan Air Baku	Air Bersih dan Sanitasi	Perumahan Dan Permukiman
	Layanan Perkantoran	12	layanan	219.879,0				
8	Penyelenggaraan Perbenihan Tanaman Hutan			20.418,8				
	Kebun benih semai/kebun benih klon/areal sumber daya genetik (RBS/KBK/ASDG)	80	Ha	3.000,0	Pusat	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Berkelanjutan termasuk di Kawasan Rawan Bencana	Pencegahan dan Penanggulangan Bencana (a.l. Kebakaran Hutan)	Pembangunan Wilayah
	Tersedianya bibit berkualitas	2	juta batang	6.000,0	Pusat	Pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi	Pembangunan Sarana dan Prasarana Pertanian (termasuk irigasi)	Ketahanan Pangan
	Sumber benih terkelola	10500	Ha	34,0				
	Layanan Perkantoran	12	layanan	11.384,8				

No.	Program/Kegiatan/Output	Target	Satuan	Alokasi (Juta Rupiah)	Lokasi	Kegiatan Prioritas	Program Prioritas	Prioritas Nasional
VI	Program Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem			2.033.159,4				
1	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen KSDAE (Setditjen KSDAE)			900.306,3				
	Meningkatnya Nilai SAKIP Ditjen KSDAE	78	point SAKIP	19.120,8				
	Layanan Dukungan Manajemen Eselon I	1	Layanan	530,7				
	Layanan Internal (Overhead)	1	Layanan	3.063,3				
	Layanan Perkantoran	12	layanan	877.591,529				
2	Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam			18.771,7				
	Integrasi zonasi/blok pengelolaan kawasan konservasi ke dalam Peta RBI Skala 1:50.000 (One Map Policy) sebagai dasar pengelolaan KK untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat desa/adat	551	kawasan konservasi	1.200,0				
	Rekomendasi hasil evaluasi fungsi Kawasan Konservasi	110	unit KK	1.100,0				
	Data dan Informasi Kawasan Konservasi yang valid dan reliable	521	paket data	1.616,9				
	Kerjasama pembangunan dan penguatan pada Kawasan Konservasi	20	PKS	1.452,0				
	Dokumen perencanaan penataan kawasan konservasi yang tersusun dan mendapat pengesahan	180	dokumen	1.702,8				
	Revisi penetapan 100 unit KPHK dan usulan baru	7	KPHK	350,0				
	Forest Programme III (Direktorat PIKA)	1	Kegiatan	11.000,0				
	Layanan Internal (Overhead)	1	Layanan	350,0				
3	Pengelolaan Kawasan Konservasi			76.111,1				
	Nilai efektivitas pengelolaan kawasan konservasi non taman nasional di tingkat	100	unit kk	550,0				

No.	Program/Kegiatan/Output	Target	Satuan	Alokasi (Juta Rupiah)	Lokasi	Kegiatan Prioritas	Program Prioritas	Prioritas Nasional
	tapak serta keanekaragaman hayati							
	Jumlah dokumen perencanaan pengelolaan kawasan konservasi	50	dokumen	740,0				
	Luas kawasan konservasi yang dipulihkan	40.000	hektar	900,0				
	Jumlah usaha ekonomi produktif di desa sekitar kawasan konservasi	159	Kelompok	362,0				
	Luas akses masyarakat dalam pemanfaatan potensi kawasan konservasi	100.000	hektar	429,1				
	Jumlah KPHK pada Kawasan Konservasi non Taman Nasional yang beroperasi	60	unit KPHK	400,0				
	Jumlah gangguan yang berhasil diturunkan pada kawasan konservasi dengan pengelolaan kolaboratif berbasis masyarakat	224	Kejadian	500,0				
	Sarana prasarana pengendalian kebakaran hutan di kawasan konservasi non taman nasional	26	unit manajemen	17.200,0	Pusat	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Berkelanjutan termasuk di Kawasan Rawan Bencana	Pencegahan dan Penanggulangan Bencana (a.l. Kebakaran Hutan)	Pembangunan Wilayah
	Sarana Prasarana Pengendalian Kebakaran Hutan di Taman Nasional	41	unit manajemen	38.950,0	Pusat	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Berkelanjutan termasuk di Kawasan Rawan Bencana	Pencegahan dan Penanggulangan Bencana (a.l. Kebakaran Hutan)	Pembangunan Wilayah
	Biodiversity Conservation and Climate Protection in The Gunung Leuser Ecosystem	1	Kegiatan	15.580,0				
	Layanan Internal (Overhead)	1	Layanan	500,0				
4	Konservasi Spesies dan Genetik			32.815,0				
	Persentase Peningkatan Populasi Spesies Terancam Punah secara kolaboratif dengan masyarakat	2	%	676,0				

No.	Program/Kegiatan/Output	Target	Satuan	Alokasi (Juta Rupiah)	Lokasi	Kegiatan Prioritas	Program Prioritas	Prioritas Nasional
	Jumlah Nilai Ekspor dan PNBP dari Pemanfaatan TSL dan Bioprospecting	5	Triyun	713,0				
	Jumlah Hasil Assesment Aman Lingkungan terhadap Produk Rekayasa Genetika	4	Produk Rekayasa Genetik	1.450,0				
	Jumlah kertas posisi Indonesia dalam Pertemuan Konvensi Internasional bidang perundingan perdagangan internasional berbasis keanekaragaman hayati	4	Kertas Posisi	1.550,0				
	Jenis/spesies yang meningkat populasinya pada lembaga konservasi	6	spesies	830,0				
	Jumlah Penangkar yang tersertifikasi untuk melakukan peredaran TSL	10	unit	670,0				
	Data dan informasi sebaran keanekaragaman spesies dan genetik	7	paket data ekoregion	510,0				
	Sistem basis data balai kliring nasional	1	unit	200,0				
	Jumlah Suaka satwa (Sanctuary) spesies terancam punah prioritas yang beroperasi sebagai daya tarik wisata	10	unit	110,0				
	Jumlah Prior Informed Consent (PIC) pemanfaatan sumberdaya genetik yang diterbitkan	2	PIC	350,0				
	Pengelolaan kolaboratif hutan konservasi bersama masyarakat sekitar kawasan hutan konservasi non taman nasional (Sarana prasarana Wildlife Rescue Unit (WRU)	10	unit	21.050,0	Pusat	Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa dan Kawasan termasuk Kawasan Transmigrasi dan Sumber Daya Hutan	Pembangunan Perdesaan	Pembangunan Wilayah
	Pengelolaan kolaboratif hutan konservasi bersama masyarakat sekitar kawasan hutan konservasi taman nasional (Sarana prasarana Wildlife Rescue Unit (WRU)	2	unit	4.206,0	Pusat	Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa dan Kawasan termasuk Kawasan Transmigrasi dan Sumber Daya Hutan	Pembangunan Perdesaan	Pembangunan Wilayah
	Layanan Internal	1	Layanan	500,0				
5	Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan			6.760,0				

No.	Program/Kegiatan/Output	Target	Satuan	Alokasi (Juta Rupiah)	Lokasi	Kegiatan Prioritas	Program Prioritas	Prioritas Nasional
	Konservasi							
	Jumlah kunjungan wisata ke kawasan konservasi non taman nasional dan taman nasional	4.350.000	orang	2.620,0				
	Jumlah unit usaha dalam pemanfaatan pariwisata alam	20	unit	1.200,0				
	Jumlah unit usaha dalam pemanfaatan jasa lingkungan air di Kawasan Konservasi	5	unit	550,0				
	Pemanfaatan jasa lingkungan energi air di kawasan konservasi (mini/mikrohidro)	35	KWatt	750,0				
	Pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi di kawasan konservasi	1	unit	450,0				
	Registrasi atau sertifikasi karbon di kawasan konservasi	1	unit	700,0				
	Layanan Internal (Overhead)	1	Layanan	490,0				
6	Pembinaan Konservasi Ekosistem Esensial			5.341,0				
	Jumlah Forum Kelembagaan Pengelolaan Ekosistem Esensial	10	KEE	2.141,0				
	Paket data dan informasi kawasan ekosistem esensial	14	dokumen	400,0				
	Rencana aksi pengembangan pengelolaan kawasan ekosistem esensial	10	dokumen	250,0				
	Penataan Pengelolaan Kawasan Ekosistem Karst	2	dokumen	900,0				
	Penataan Pengelolaan Kawasan Ekosistem Mangrove	2	dokumen	400,0				
	Koleksi spesies lokal/endemik/langka/terancam punah yang diupayakan konservasinya di 30 unit taman Kehati sebanyak 300 spesies	60	species	450,0				
	Layanan Internal (Overhead)	1	Layanan	800,0				
7	Konservasi Sumber Daya Alam Hayati			367.802,4				

No.	Program/Kegiatan/Output	Target	Satuan	Alokasi (Juta Rupiah)	Lokasi	Kegiatan Prioritas	Program Prioritas	Prioritas Nasional
	Rencana Penataan dan Pengelolaan Kawasan Konservasi berbasis Masyarakat	119	unit	17.468,6	Pusat	Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa dan Kawasan termasuk Kawasan Transmigrasi dan Sumber Daya Hutan	Pembangunan Perdesaan	Pembangunan Wilayah
	Sarana Prasarana pengendalian kebakaran hutan konservasi	95	unit	9.792,2	Pusat	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Berkelanjutan termasuk di Kawasan Rawan Bencana	Pencegahan dan Penanggulangan Bencana (a.l. Kebakaran Hutan)	Pembangunan Wilayah
	Pengelolaan kolaboratif hutan konservasi bersama masyarakat di kawasan hutan konservasi Kawasan Konservasi	75.026	Ha	19.643,0	Pusat	Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa dan Kawasan termasuk Kawasan Transmigrasi dan Sumber Daya Hutan	Pembangunan Perdesaan	Pembangunan Wilayah
	Jumlah gangguan yang berhasil diturunkan pada kawasan konservasi dengan pengelolaan kolaboratif berbasis masyarakat	123	Kejadian	32.834,8	Pusat	Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa dan Kawasan termasuk Kawasan Transmigrasi dan Sumber Daya Hutan	Pembangunan Perdesaan	Pembangunan Wilayah
	Pemulihan Kawasan Konservasi yang terdegradasi secara kolaboratif bersama masyarakat	9.278	hektar	19.388,6	Pusat	Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa dan Kawasan termasuk Kawasan Transmigrasi dan Sumber Daya Hutan	Pembangunan Perdesaan	Pembangunan Wilayah
	Jumlah Nilai PNPB dari Pemanfaatan TSL	10	Milyar Rupiah	1.540,7				

No.	Program/Kegiatan/Output	Target	Satuan	Alokasi (Juta Rupiah)	Lokasi	Kegiatan Prioritas	Program Prioritas	Prioritas Nasional
	Persentase Peningkatan Populasi Spesies Terancam Punah secara kolaboratif dengan masyarakat	2	%	28.253,6	Pusat	Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa dan Kawasan termasuk Kawasan Transmigrasi dan Sumber Daya Hutan	Pembangunan Perdesaan	Pembangunan Wilayah
	Sarana dan Prasarana Ekowisata pada Kawasan Konservasi	22	unit	96.885,8	Pusat		Pengembangan 3 Kawasan Pariwisata (dari 10)	Pengembangan Dunia Usaha Dan Pariwisata
	Energi listrik yang dihasilkan dari mini/mikro hidro di kawasan konservasi	70	KWatt	5.000,0	Pusat	Pengembangan PLT Hidro dan Nuklir	Energi Baru Terbarukan (EBT) dan Konservasi Energi	Ketahanan Energi
	Kelembagaan pengelolaan ekosistem esensial yang terbentuk dan berfungsi	6	unit	709,4				
	Nilai SAKIP Ditjen KSDAE sebesar 78 poin	77,5	Poin	24.830,9				
	Sarana dan prasarana ekowisata pada kawasan konservasi di Kawasan Danau Toba dan sekitarnya	7	unit	31.773,5	Pusat	Pengembangan Danau Toba	Pengembangan 3 Kawasan Pariwisata (dari 10)	Pengembangan Dunia Usaha Dan Pariwisata
	Sarana dan prasarana ekowisata pada kawasan konservasi di Kawasan Borobudur dan sekitarnya	2	unit	13.734,7	Pusat	Pengembangan Borobudur dan sekitarnya	Pengembangan 3 Kawasan Pariwisata (dari 10)	Pengembangan Dunia Usaha Dan Pariwisata
	Sarana dan prasarana ekowisata pada kawasan konservasi di Kawasan Mandalika dan sekitarnya	7	unit	24.436,5	Pusat	Pengembangan Mandalika	Pengembangan 3 Kawasan Pariwisata (dari 10)	Pengembangan Dunia Usaha Dan Pariwisata

No.	Program/Kegiatan/Output	Target	Satuan	Alokasi (Juta Rupiah)	Lokasi	Kegiatan Prioritas	Program Prioritas	Prioritas Nasional
	Jumlah Wildlife Rescue Unit yang terbentuk dan beroperasi bersama masyarakat dalam rangka pengelolaan kolaboratif hutan konservasi bersama masyarakat	12	unit	7.152,4	Pusat	Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa dan Kawasan termasuk Kawasan Transmigrasi dan Sumber Daya Hutan	Pembangunan Perdesaan	Pembangunan Wilayah
	Pengelolaan kolaboratif hutan konservasi bersama masyarakat di sekitar kawasan hutan konservasi Kawasan Konservasi	117	Kelompok	31.454,7	Pusat	Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa dan Kawasan termasuk Kawasan Transmigrasi dan Sumber Daya Hutan	Pembangunan Perdesaan	Pembangunan Wilayah
	Layanan Internal (Overhead)	1	Layanan	2.902,9				
8	Pengelolaan Taman Nasional			625.251,9				
	Rencana Penataan dan Pengelolaan Kawasan Konservasi berbasis Masyarakat	48	unit	23.206,6	Pusat	Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa dan Kawasan termasuk Kawasan Transmigrasi dan Sumber Daya Hutan	Pembangunan Perdesaan	Pembangunan Wilayah
	Sarana Prasarana Pengendalian Kebakaran Hutan Konservasi di Taman Nasional	48	unit	20.587,1	Pusat	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Berkelanjutan termasuk di Kawasan Rawan Bencana	Pencegahan dan Penanggulangan Bencana (a.l. Kebakaran Hutan)	Pembangunan Wilayah
	Pengelolaan kolaboratif hutan konservasi bersama masyarakat di kawasan hutan konservasi taman nasional	25.905,92	hektar	40.977,5	Pusat	Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa dan Kawasan termasuk Kawasan Transmigrasi dan Sumber Daya Hutan	Pembangunan Perdesaan	Pembangunan Wilayah

No.	Program/Kegiatan/Output	Target	Satuan	Alokasi (Juta Rupiah)	Lokasi	Kegiatan Prioritas	Program Prioritas	Prioritas Nasional
	Pengelolaan kolaboratif hutan konservasi bersama masyarakat di sekitar kawasan hutan konservasi taman nasional	237	Kelompok	58.841,2	Pusat	Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa dan Kawasan termasuk Kawasan Transmigrasi dan Sumber Daya Hutan	Pembangunan Perdesaan	Pembangunan Wilayah
	Jumlah gangguan yang berhasil diturunkan pada kawasan Taman Nasional dengan pengelolaan kolaboratif berbasis masyarakat	141	Kejadian	64.420,1	Pusat	Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa dan Kawasan termasuk Kawasan Transmigrasi dan Sumber Daya Hutan	Pembangunan Perdesaan	Pembangunan Wilayah
	Pemulihan Kawasan Konservasi yang terdegradasi secara kolaboratif bersama masyarakat	30.722	hektar	53.112,8	Pusat	Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa dan Kawasan termasuk Kawasan Transmigrasi dan Sumber Daya Hutan	Pembangunan Perdesaan	Pembangunan Wilayah
	Persentase Peningkatan Populasi Spesies Terancam Punah secara kolaboratif dengan masyarakat	2	%	47.176,7	Pusat	Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa dan Kawasan termasuk Kawasan Transmigrasi dan Sumber Daya Hutan	Pembangunan Perdesaan	Pembangunan Wilayah
	Sarana dan Prasarana Ekowisata pada Taman Nasional	38	unit	140.084,7	Pusat		Pengembangan 3 Kawasan Pariwisata (dari 10)	Pengembangan Dunia Usaha Dan Pariwisata
	Energi listrik yang dihasilkan dari Mini/Mikro Hidro di Taman Nasional	9.145	Kwatt	8.150,0	Pusat	Pengembangan PLT Hidro dan Nuklir	Energi Baru Terbarukan (EBT) dan Konservasi Energi	Ketahanan Energi
	Nilai SAKIP Ditjen KSDAE sebesar 78 poin	77,5	Poin	26.111,0				

No.	Program/Kegiatan/Output	Target	Satuan	Alokasi (Juta Rupiah)	Lokasi	Kegiatan Prioritas	Program Prioritas	Prioritas Nasional
	Sarana dan Prasarana Ekowisata pada Taman Nasional di Kawasan Danau Toba dan sekitarnya	2	unit	10.588,8	Pusat	Pengembangan Danau Toba	Pengembangan 3 Kawasan Pariwisata (dari 10)	Pengembangan Dunia Usaha Dan Pariwisata
	Sarana dan Prasarana Ekowisata pada Taman Nasional di Kawasan Borobudur dan sekitarnya	2	unit	12.060,0	Pusat	Pengembangan Borobudur dan sekitarnya	Pengembangan 3 Kawasan Pariwisata (dari 10)	Pengembangan Dunia Usaha Dan Pariwisata
	Sarana dan Prasarana Ekowisata pada Taman Nasional di Kawasan Mandalika dan sekitarnya	3	unit	25.850,0	Pusat	Pengembangan Mandalika	Pengembangan 3 Kawasan Pariwisata (dari 10)	Pengembangan Dunia Usaha Dan Pariwisata
	Jumlah Wildlife Rescue Unit yang terbentuk dan beroperasi bersama masyarakat dalam rangka pengelolaan kolaboratif hutan konservasi bersama masyarakat	2	unit	1.160,0	Pusat	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Berkelanjutan termasuk di Kawasan Rawan Bencana	Pencegahan dan Penanggulangan Bencana (a.l. Kebakaran Hutan)	Pembangunan Wilayah
	Intervensi metode agroengineering di daerah buffer TN Lore Lindu	400	ha	6.000,0	Kab. Poso	Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular	Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Kesehatan
	Restorasi ekosistem untuk pengendalian penyebaran keong di TN Lore Lindu	300	ha	6.000,0	Kab. Poso	Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular	Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Kesehatan
	Pengamanan kawasan TN Lore Lindu	217.991,18	ha	4.000,0	Kab. Poso	Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular	Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Kesehatan
	Forest Programme II (Development of Integrated Biodiversity Conservation and Watershed Management) Jambi - BBTN Kerinci Seblat	1	Kegiatan	8.910,0				
	Forest Programme III (BBTN Lore Lindu)	1	Kegiatan	8.800,0				

No.	Program/Kegiatan/Output	Target	Satuan	Alokasi (Juta Rupiah)	Lokasi	Kegiatan Prioritas	Program Prioritas	Prioritas Nasional
	Forest Investment Program - Project 1 (FIP-1) Community-Focused Investments to Address Deforestation and Forest Degradation (BBTN Betung Keruhun Danau Sentarum)	1	Kegiatan	7.082,0				
	Sarana prasarana Ekowisata 3 Taman Nasional Model SBSN	3	unit	51.400,0				
	Layanan Internal (Overhead)	1	Layanan	733,4				
VII	Program Planologi dan Tata Lingkungan			1.133.562,5	1.133.562,5			
1	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PKTL			69.973,5	8.019,3			
	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) A (78 poin). Target tahun 2018 sebesar 77 poin	77	poin	7.599,4				
	Layanan Internal (Overhead)	1	layanan	419,9				
	Layanan Perkantoran	12	layanan	61.954,2				
2	Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan			66.996,1				
	Kawasan hutan yang telah selesai ditetapkan	5% tambahan penetapan di 2018	persen	5.000,0	Pusat	Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa dan Kawasan termasuk Kawasan Transmigrasi dan Sumber Daya Hutan	Pembangunan Perdesaan	Pembangunan Wilayah
	Kawasan hutan yang dilepaskan untuk TORA	+/- 1.630.421 Ha (deviasi 11%)	hektar	47.301,3	Pusat	Penataan Penguasaan dan Pemilikan Tanah Obyek Reforma Agraria	Reforma Agraria	Pembangunan Wilayah

No.	Program/Kegiatan/Output	Target	Satuan	Alokasi (Juta Rupiah)	Lokasi	Kegiatan Prioritas	Program Prioritas	Prioritas Nasional
	Data dan peta TORA di Kawasan Hutan yang mutakhir	26	Provinsi	6.373,0	Pusat	Penataan Penguasaan dan Pemilikan Tanah Obyek Reforma Agraria	Reforma Agraria	Pembangunan Wilayah
	Kawasan hutan yang dilepaskan khususnya untuk perkebunan yang telah dievaluasi	13	Provinsi	5.650,2	Pusat	Penataan Penguasaan dan Pemilikan Tanah Obyek Reforma Agraria	Reforma Agraria	Pembangunan Wilayah
	Draft SK Menteri tentang perubahan fungsi dan peruntukan bagi permohonan yang memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku	100	persen	1.000,0				
	Layanan Internal (Overhead)	1	laporan	-				
	Layanan Perkantoran	12	layanan	1.671,6				
3	Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan			3.625,5				
	Data dan Peta SDH Nasional mendukung pengalokasian KH	34	Provinsi	1.456,3				
	Jumlah KPH yang telah memiliki data dan informasi potensi sumberdaya hutan	100	KPH	233,8				
	Informasi geospasial tematik lingkungan hidup dan kehutanan mendukung kebijakan satu peta (One Map Policy)	34	Provinsi	1.935,4				
	Penafsiran Data Citra Resolusi Tinggi untuk Pencapaian Target Tanah Objek Reforma Agraria (TORA)	33	provinsi	4.819,6				
	Layanan Perkantoran	12	layanan	1.163,5				
4	Perencanaan, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan			45.089,1				
	Persentase permohonan penggunaan kawasan hutan yang memenuhi syarat dan ketentuan diproses penerbitan izinnya sesuai peraturan yang berlaku	100	Persen	1.247,1				

No.	Program/Kegiatan/Output	Target	Satuan	Alokasi (Juta Rupiah)	Lokasi	Kegiatan Prioritas	Program Prioritas	Prioritas Nasional
	Jumlah KPH yang memiliki peta penetapan dan kelembagaan KPH	92	KPH	2.000,0	Pusat	Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa dan Kawasan termasuk Kawasan Transmigrasi dan Sumber Daya Hutan	Pembangunan Perdesaan	Pembangunan Wilayah
	Jumlah Provinsi yang memiliki peta arahan pemanfaatan hutan yang terupdate setiap tahun	34	Provinsi	370,0				
	Jumlah KPH terintegrasi dalam rencana tata ruang wilayah	34	Provinsi	861,0				
	Jumlah KPH terintegrasi dalam RKTN, RKTP dan RKTG	34	Provinsi	691,2				
	Data dan informasi Spasial dan Dokumentasi Pemanfaatan Ruang Kawasan Hutan, Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan	3	Dokumen	1.478,0				
	Forest Investment Program Promoting Sustainable Community Based Natural Resource Management and Institutional Development Project	1	laporan	34.198,3				
	Layanan Internal (Overhead)	1	layanan	-				
	Penyediaan Data Areal Perhutanan Sosial Jawa	4	provinsi	3.054,0				
	Layanan Perkantoran	12	layanan	1.189,5				
5	Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor			3.808,2				
	Jumlah KLHS zonasi wilayah pesisir layak dan terjamin kualitasnya berbasis daya dukung dan daya tampung	5	KLHS RZWP3K	260,0				
	Jumlah KLHS yang terjamin kualitasnya berbasis Daya Dukung Daya Tampung	10	KLHS	421,9				
	Jumlah KLHS yang terreview kelayakannya	15	KLHS	337,9				
	Jumlah RPPLH Nasional yang tersusun, ditetapkan dan menjadi acuan	1	dokumen	200,1				

No.	Program/Kegiatan/Output	Target	Satuan	Alokasi (Juta Rupiah)	Lokasi	Kegiatan Prioritas	Program Prioritas	Prioritas Nasional
	<i>pemerintah</i>							
	Jumlah RPPLH Provinsi yang tersusun, diterapkan dan menjadi acuan pemerintah daerah	5	provinsi	143,0				
	Jumlah RPPLH Kab/Kota yang tersusun, diterapkan dan menjadi acuan pemerintah daerah	10	kab/kota	152,1				
	Jumlah penetapan indikasi daya dukung nasional dengan pendekatan jasa ekosistem pada setiap ekoregion	1	indeks	495,0				
	Jumlah satuan peta ekoregion pada skala 1:250.000	9	satuan peta	495,0				
	Jumlah Prov/Kab/Kota yang memiliki neraca SDA LH dan PDRB Hijau	2	dokumen	495,0				
	Layanan Internal (Overhead)	1	layanan	-				
	Layanan Perkantoran	12	layanan	800,2				
6	Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan			3.905,95				
	Persentase permohonan penilaian dokumen lingkungan yang terlayani sesuai dengan NSPK dan standar pelayanan publik	100	persen	1.019,9				
	Sistem pengambilan keputusan kajian dampak lingkungan yang efektif untuk mendukung proses pengambilan keputusan yang berkualitas	100	persen	675,0				
	Jumlah KPA berlisensi dan pemeriksa UKL UPL daerah yang melakukan penilaian dan pemeriksaan dokumen lingkungan sesuai dengan NSPK	50	lembaga /instansi	1.305,1				
	Layanan Perkantoran	12	layanan	906,0				

No.	Program/Kegiatan/Output	Target	Satuan	Alokasi (Juta Rupiah)	Lokasi	Kegiatan Prioritas	Program Prioritas	Prioritas Nasional
7	Pemantapan Kawasan Hutan			940.164,1				
	Jumlah KPH yang memiliki rancangan rencana pengelolaan	65	KPH	31.419,0	Pusat	Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa dan Kawasan termasuk Kawasan Transmigrasi dan Sumber Daya Hutan	Pembangunan Perdesaan	Pembangunan Wilayah
	Data dan informasi sumber daya hutan hasil inventarisasi klaster TSP/PSP	179	klaster	10.562,0	Pusat	Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa dan Kawasan termasuk Kawasan Transmigrasi dan Sumber Daya Hutan	Pembangunan Perdesaan	Pembangunan Wilayah
	Dokumen pengendalian pemantapan kawasan hutan	100	persen	1.727,9				
	Dokumen berita acara tata batas kawasan hutan untuk penyelesaian TORA	40.565	km	310.163,9	Pusat	Penataan Penguasaan dan Pemilikan Tanah Obyek Reforma Agraria	Reforma Agraria	Pembangunan Wilayah
	Dokumen hasil inventarisasi dan verifikasi obyek TORA dalam kawasan hutan	26	provinsi	448.730,4	Pusat	Penataan Penguasaan dan Pemilikan Tanah Obyek Reforma Agraria	Reforma Agraria	Pembangunan Wilayah
	Layanan Perkantoran	12	layanan	137.561,0				
VIII	Program Peningkatan Penyuluhan dan Pengembangan SDM			325.914,9				
1	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM	83	point	46.215,237				
	Tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan BP2SDM	83	point	8.833,8				
	Layanan Perkantoran	12	layanan	37.381,4				
2	Perencanaan dan Pengembangan SDM			26.736,2				

No.	Program/Kegiatan/Output	Target	Satuan	Alokasi (Juta Rupiah)	Lokasi	Kegiatan Prioritas	Program Prioritas	Prioritas Nasional
	Jumlah Tenaga Bakti Rimawan dalam memenuhi kebutuhan tenaga pengelola KPH	440	Orang	18.640,0				
	Jumlah SDM LHK yang meningkat kompetensinya	700	Orang	6.896,2				
	Layanan Perkantoran	12	layanan	1.200,0				
3	Penyelenggaraan Diklat Aparatur dan Non Aparatur LHK			124.094,4				
	Jumlah SDM aparatur dan non aparatur LHK meningkat kapasitasnya	2679	Orang	25.763,2				
	Jumlah SDM LHK yang lulus pendidikan karya siswa (S2 dan S3)	85	Orang	4.500,0				
	Pengembangan KHDTK sebagai sarana pembelajaran kediklatan untuk mendukung SMK Kehutanan dan Lainnya	4	unit	4.500,0				
	Jumlah tenaga bakti rimawan yang meningkat kapasitasnya	230	Orang	950,0	Pusat	Pemenuhan Sarpras Pendidikan Vokasi Yang Berkualitas	Pendidikan Vokasi	Pendidikan
	Jumlah tenaga pendamping KTH dalam pemberdayaan masyarakat di desa-desa hutan meningkat kapasitasnya	300	Orang	1.400,0				
	Pengembangan KHDTK sebagai sarana pembelajaran kediklatan (Non Prioritas Nasional)	7	unit	1.460,0				
	Layanan internal (overhead)	1	layanan	168,0				
	Layanan Perkantoran	12	layanan	85.353,2				
4	Penyelenggaraan Pendidikan Menengah Kejuruan Kehutanan			99.297,5				
	Jumlah tenaga teknis menengah kejuruan kehutanan yang tersedia (non prioritas nasional)	450	Orang	7.350,5				
	Jumlah tenaga teknis menengah kejuruan kehutanan (prioritas nasional)	450	Orang	60.000,0	Pusat	Pendidikan dan Pelatihan Kewirausahaan dan Kecakapan Kerja	Pendidikan Vokasi	Pendidikan
	Layanan Perkantoran	12	layanan	31.947,0				

No.	Program/Kegiatan/Output	Target	Satuan	Alokasi (Juta Rupiah)	Lokasi	Kegiatan Prioritas	Program Prioritas	Prioritas Nasional
5	Penyelenggaraan Pelatihan Masyarakat dan Pengembangan Generasi Lingkungan Hidup			18.717,0				
	Jumlah kader lingkungan hidup yang meningkat kapasitasnya	375	orang	900,0				
	Jumlah generasi muda LH yang meningkat kapasitasnya	4100	orang	8.667,0				
	Jumlah sekolah/kampus yang peduli dan berbudaya lingkungan hidup	380	unit	1.900,0				
	Jumlah anggota saka kalpataru peduli dan berbudaya lingkungan hidup	500	orang	700,0				
	Layanan Perkantoran	12	layanan	6.550,0				
6	Peningkatan Penyuluhan			10.854,6				
	Peningkatan jumlah kelas kelompok tani desa-desa hutan dari tingkatan pemula ke madya (non prioritas nasional)	367	unit	1.865,9	Pusat	Perluasan Akses Pembiayaan	Perluasan Akses Usaha Mikro, Kecil, dan Koperasi	Penanggulangan Kemiskinan
	Peningkatan jumlah kelas kelompok tani desa-desa hutan dari tingkatan pemula ke madya (prioritas nasional)	367	unit	5.500,0				
	Jumlah unit koperasi kelompok tani hutan yang dibentuk	10	Unit	462,1				
	Jumlah Lembaga Pelatihan Pemagangan Usaha Kehutanan Swadaya (LP2UKS).	10	Unit	672,0				
	Peningkatan kapasitas tenaga pendamping/penyuluh handal bagi KTH (prioritas nasional)	200	Orang	1.004,6	Pusat	Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa dan Kawasan termasuk Kawasan Transmigrasi dan Sumber Daya Hutan	Pembangunan Perdesaan	Pembangunan Wilayah
	Peningkatan kapasitas tenaga pendamping/penyuluh handal (non prioritas nasional)	200	Orang	150,0				
	Layanan Perkantoran	12	layanan	1.200,0				
IX	Program Perhutanan Sosial dan			416.014,98				

No.	Program/Kegiatan/Output	Target	Satuan	Alokasi (Juta Rupiah)	Lokasi	Kegiatan Prioritas	Program Prioritas	Prioritas Nasional
	Kemitraan Lingkungan							
1	Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PSKL (Setditjen PSKL)			72.076,2				
	Layanan Dukungan Manajemen Eselon I	1	Layanan	14.297,0				
	Layanan Internal (Overhead)	1	Layanan	0,0				
	Layanan Perkantoran	12	layanan	57.779,160				
2	Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial			150.241,5				
	Luas hutan yang dikelola masyarakat menjadi 12,7 juta Ha dalam bentuk HKm,HD,HTR, HR, Hutan Adat dan Kemitraan	2.300.000	hektar	144.587,5	Pusat	Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa dan Kawasan termasuk Kawasan Transmigrasi dan Sumber Daya Hutan	Pembangunan Perdesaan	Pembangunan Wilayah
	Forest Program II Keg PKPS			4.092,0				
	Forest Program III keg PKPS			1.562,0				
3	Bina Usaha Perhutanan Sosial dan Hutan Adat			156.448,8				
	Pembentukan kelompok usaha perhutanan sosial (HKm, HD, HTR, HR, Hutan Adat dan Kemitraan) yang mandiri	2.300	Kelompok	59.500,0	Pusat	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Koperasi dan Kemitraan Usaha	Perluasan Akses Usaha Mikro, Kecil, dan Koperasi	Penanggulangan Kemiskinan
	Forest Investment Program - FIP 2			5.410,5				
	Forest Investment Program - FIP 1			20.538,8				
	Forest Program II keg BUPSHA			3.580,0				
	Forest Program III keg BUPSHA			1.875,0				
	Rupiah Murni Pendamping FP II Keg BUPSHA			357,0				
	Rupiah Murni Pendamping FP III Keg BUPSHA			187,5				

No.	Program/Kegiatan/Output	Target	Satuan	Alokasi (Juta Rupiah)	Lokasi	Kegiatan Prioritas	Program Prioritas	Prioritas Nasional
	Pemberian Bantuan Ekonomi Produktif Perhutanan Sosial (HKm, HD, HTR, HR, Hutan Adat dan Kemitraan)	450	Unit	40.000,0	Pusat	Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa dan Kawasan termasuk Kawasan Transmigrasi dan Sumber Daya Hutan	Pembangunan Perdesaan	Pembangunan Wilayah
	Pemanfaatan di Bawah Tegakan Hutan dalam bentuk Agroforestry pada kegiatan Perhutanan Sosial	140.000	Ha	25.000,0	Pusat	Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa dan Kawasan termasuk Kawasan Transmigrasi dan Sumber Daya Hutan	Pembangunan Perdesaan	Pembangunan Wilayah
4	Kemitraan Lingkungan dan Peran Serta Masyarakat			9.195,0				
	Jumlah komunitas kemitraan lingkungan	200	komunitas	9.195,0				
5	Penanganan Konflik, Tenurial, dan Hutan Adat			28.053,5				
	Penanganan Konflik dan Tenurial	700.000	Ha	15.353,5	Pusat	Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa dan Kawasan termasuk Kawasan Transmigrasi dan Sumber Daya Hutan	Pembangunan Perdesaan	Pembangunan Wilayah
	Penyelenggaraan Verifikasi Hutan Adat	20.000	Ha	12.700,0	Pusat	Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa dan Kawasan termasuk Kawasan Transmigrasi dan Sumber Daya Hutan	Pembangunan Perdesaan	Pembangunan Wilayah
X	Program Penegakan Hukum Lingkungan			372.606,4				

No.	Program/Kegiatan/Output	Target	Satuan	Alokasi (Juta Rupiah)	Lokasi	Kegiatan Prioritas	Program Prioritas	Prioritas Nasional
	Hidup dan Kehutanan							
1	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PHLHK (Setditjen PHLHK)			138.072,4				
	SAKIP Ditjen Penegakan Hukum LHK dengan nilai minimal 78,00 (A) di tahun 2019	76	poin SAKIP	12.068,2				
	Layanan Internal (Overhead)	12	bulan	1.730,0				
	Layanan Perkantoran	12	layanan	124.274,2				
2	Pencegahan dan Pengamanan Hutan			98.059,6				
	Luas hutan yang diamankan dari gangguan dan ancaman bidang kehutanan melalui kegiatan sosialisasi, patroli dan operasi	5.000.000	hektar	65.070,7	Pusat	Penegakan Hukum yang Berkualitas	Kepastian Hukum	Politik, Hukum, Dan Pertahanan Keamanan
	Sarana, Prasarana dan Kapasitas Polisi Kehutanan dalam Pelaksanaan Pengamanan dan Penegakan Hukum memenuhi standar minimum	1.800	orang	32.988,9	Pusat	Penegakan Hukum yang Berkualitas	Kepastian Hukum	Politik, Hukum, Dan Pertahanan Keamanan
3	Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup			18.199,0				
	Pendaftaran Gugatan Perdata Lingkungan Hidup melalui Pengadilan	10	gugatan	9.599,0	Pusat	Penegakan Hukum yang Berkualitas	Kepastian Hukum	Politik, Hukum, Dan Pertahanan Keamanan
	Kasus Sengketa Lingkungan Hidup yang diselesaikan diluar pengadilan dalam bentuk kesepakatan	75	persentase	8.600,0	Pusat	Penegakan Hukum yang Berkualitas	Kepastian Hukum	Politik, Hukum, Dan Pertahanan Keamanan
4	Penanganan Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi			40.272,6				
	Pengaduan yang masuk tertangani	100	persen	13.522,6	Pusat	Penegakan Hukum yang Berkualitas	Kepastian Hukum	Politik, Hukum, Dan Pertahanan Keamanan
	Usaha dan/atau kegiatan yang diawasi dan tingkat penataan perusahaan	100	persen	13.750,0	Pusat	Penegakan Hukum yang Berkualitas	Kepastian Hukum	Politik, Hukum, Dan Pertahanan Keamanan

No.	Program/Kegiatan/Output	Target	Satuan	Alokasi (Juta Rupiah)	Lokasi	Kegiatan Prioritas	Program Prioritas	Prioritas Nasional
	Penerapan sanksi administrasi	70	persen	6.000,0	Pusat	Penegakan Hukum yang Berkualitas	Kepastian Hukum	Politik, Hukum, Dan Pertahanan Keamanan
	Sarana, Prasarana dan Kapasitas PPLH dalam Pelaksanaan Pengawasan memenuhi standar minimum	300	Orang	7.000,0	Pusat	Penegakan Hukum yang Berkualitas	Kepastian Hukum	Politik, Hukum, Dan Pertahanan Keamanan
5	Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan			78.002,8				
	Kasus pidana LHK yang diselesaikan sampai dengan P21 (berkas perkara dinyatakan Lengkap)	75	Persen	65.194,8	Pusat	Penegakan Hukum yang Berkualitas	Kepastian Hukum	Politik, Hukum, Dan Pertahanan Keamanan
	Sarana, Prasarana dan Kapasitas PPNS dalam Pelaksanaan Penyidikan memenuhi standar minimum	400	orang	12.808,0	Pusat	Penegakan Hukum yang Berkualitas	Kepastian Hukum	Politik, Hukum, Dan Pertahanan Keamanan
XI	Program Pengendalian Perubahan Iklim			320.439,9				
1	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PPI (Setditjen PPI)			78.876,0				
	Layanan Dukungan Manajemen Eselon I	76	poin SAKIP	21.000,0				
	Layanan Internal (Overhead)	1	layanan	1.000,0				
	Layanan Perkantoran	12	layanan	56.876,0				
2	Adaptasi Perubahan Iklim			4.000,0				
	Pengembangan/Pemutakhiran sistem informasi data indeks kerentanan (SIDIK)	1	sistem	1.000,0				

No.	Program/Kegiatan/Output	Target	Satuan	Alokasi (Juta Rupiah)	Lokasi	Kegiatan Prioritas	Program Prioritas	Prioritas Nasional
	Pengembangan program kampung iklim (Proklm)	100	desa	3.000,0				
3	Mitigasi Perubahan Iklim			31.063,9				
	Fasilitasi penyelenggaraan mitigasi perubahan iklim	12	kab/kota	8.110,0				
	Penurunan konsumsi bahan perusak ozon (BPO)	5	persentase	22.953,9				
	Inventarisasi Gas Rumah Kaca serta Monitoring, Pelaporan dan Verifikasi			4.000,0				
	Tersedianya sistem inventarisasi gas rumah kaca (SIGN SMART) dan termutakhirkan serta aksi mitigasi yang terverifikasi dan ter-Registry	5	sektor	4.000,0				
	Mobilisasi Sumber Daya untuk Perubahan Iklim			3.500,0				
	Fasilitasi peningkatan kapasitas dan teknologi rendah karbon	10	wilayah	3.500,0				
4	Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan			199.000,0				
	Pemadaman Kebakaran Hutan dan Lahan di darat	5000	hari Ops Dam	15.000,0	Pusat	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Berkelanjutan termasuk di Kawasan Rawan Bencana	Pencegahan dan Penanggulangan Bencana (a.l Kebakaran Hutan)	Pembangunan Wilayah

No.	Program/Kegiatan/Output	Target	Satuan	Alokasi (Juta Rupiah)	Lokasi	Kegiatan Prioritas	Program Prioritas	Prioritas Nasional
	Patroli Terpadu Pencegahan Karhutla di wilayah Sumatera dan Kalimantan (desa)	731	Desa	141.905,0	Pusat	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Berkelanjutan termasuk di Kawasan Rawan Bencana	Pencegahan dan Penanggulangan Bencana (a.l Kebakaran Hutan)	Pembangunan Wilayah
	Patroli Terpadu Pencegahan Karhutla di wilayah Jawa, Bali, Nusa, Sulawesi dan Papua (desa)	50	desa	11.242,0	Pusat	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Berkelanjutan termasuk di Kawasan Rawan Bencana	Pencegahan dan Penanggulangan Bencana (a.l Kebakaran Hutan)	Pembangunan Wilayah
	Pembentukan dan pembinaan masyarakat peduli api (MPA) di wilayah provinsi rawan karhutla	300	desa	3.000,0	Pusat	Pemberdayaan Masyarakat	Pencegahan dan Penanggulangan Bencana (a.l Kebakaran Hutan)	Pembangunan Wilayah
	Fasilitasi Pembentukan Regu Brigdalkarhutla dan Pembelian Sarpras Dalkarhutla	5	KPH	12.745,0	Pusat	Sarana dan Prasarana Kebencanaan	Pencegahan dan Penanggulangan Bencana (a.l Kebakaran Hutan)	Pembangunan Wilayah
	Pemadaman kebakaran hutan dan lahan melalui udara	1	laporan	15.108,0	Pusat	Sarana dan Prasarana Kebencanaan	Pencegahan dan Penanggulangan Bencana (a.l Kebakaran Hutan)	Pembangunan Wilayah
XII	Program Pengelolaan Sampah, Limbah dan B3			278.630,3				
1	Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PSLB3			50.105,3				
	Layanan dukungan manajemen Eselon I	76	point SAKIP	22.220,0				

No.	Program/Kegiatan/Output	Target	Satuan	Alokasi (Juta Rupiah)	Lokasi	Kegiatan Prioritas	Program Prioritas	Prioritas Nasional
	<i>Layanan Perkantoran</i>	12	<i>layanan</i>	27.885,3				
2	Pengelolaan B3			40.291,4				
	<i>Penghapusan penggunaan merkuri</i>	7	<i>lokasi</i>	39.291,4	<i>Pusat</i>	<i>Lingkungan Sehat</i>	<i>Preventif dan Promotif (Gerakan Masyarakat Hidup Sehat)</i>	<i>Kesehatan</i>
	<i>Pengendalian dan Penanganan B3</i>	1	<i>dokumen</i>	1.000,0				
3	Verifikasi Pengelolaan Limbah B3 dan Limbah Non B3			5.751,1				
	<i>Peningkatan Pelayanan Perizinan Pengelolaan Limbah B3</i>	30	<i>hari kerja</i>	4.000,0				
	<i>Pengembangan Kebijakan dan Peraturan Pengelolaan Limbah B3 dan Limbah Non B3</i>	2	<i>dokumen</i>	500,0				
	<i>Penetapan dan Pengecualian Limbah B3 dan Limbah Non B3</i>	1	<i>dokumen</i>	751,1				
	<i>Penerapan Konvensi Basel untuk Pengelolaan limbah B3 dan perpindahan lintas batas limbah</i>	1	<i>dokumen</i>	500,0				
4	Penilaian Kinerja Pengelolaan Limbah B3 dan Limbah Non B3			22.489,8				
	<i>Penyediaan fasilitas penunjang percontohan pengelolaan limbah medis dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang tersedia</i>	1	<i>fasilitas</i>	2.989,8				
	<i>Penyediaan FS dan DED untuk penyediaan fasilitas pemanfaatan limbah B3 sebagai sumber energi dan bahan bakar alternatif</i>	2	<i>lokasi</i>	800,0				
	<i>Penyediaan fasilitas pemanfaatan limbah non B3 sebagai energi biomassa (reaktor biomassa)</i>	6	<i>unit</i>	11.500,0				
	<i>Pemantauan peningkatan kinerja pengelolaan limbah B3 dan limbah non B3 pada lingkungan industri</i>	400	<i>industri</i>	7.200,0				

No.	Program/Kegiatan/Output	Target	Satuan	Alokasi (Juta Rupiah)	Lokasi	Kegiatan Prioritas	Program Prioritas	Prioritas Nasional
5	Pemulihan Kontaminasi dan Tanggap Darurat Limbah B3			14.218,1				
	<i>Pemulihan lahan terkontaminasi limbah B3</i>	100.000	ton	8.218,1				
	<i>Pengembangan sistem tanggap darurat pengelolaan limbah B3</i>	2	dokumen	1.500,0				
	<i>Penyediaan data inventarisasi dan identifikasi lahan terkontaminasi limbah B3</i>	2	dokumen	2.000,0				
	<i>Pemulihan Lahan Terkontaminasi Limbah B3 Non Institusi di Kabupaten Tegal</i>	1	lokasi	2.500,0				
6	Pengelolaan Sampah			145.774,6				
	<i>Pengurangan timbulan sampah melalui penerapan (EPR)</i>	80	ton sampah berkurang	3.000,0				
	<i>Pengurangan sampah melalui pembangunan Pusat Daur Ulang (PDU)</i>	2	lokasi	5.000,0				
	<i>Penanganan sampah melalui penyediaan perangkat implementasi pemantauan dan evaluasi kota bersih, teduh dan sehat berkelanjutan (Adipura)</i>	14.000.000	ton sampah tertangani	12.000,0				
	<i>Penyediaan sarana prasarana pengelolaan sampah spesifik</i>	2	kab/kota	8.000,0				
	<i>Penanganan sampah melalui pengembangan sarpras pengelolaan sampah untuk mendukung pengurangan dan penanganan sampah di daerah</i>	56	kab/kota	117.774,6				
XIII	Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan			729.369,8				
1	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PPKL (Setditjen PPKL)			46.011,5				
	<i>Layanan dukungan manajemen Eselon I</i>	77	point SAKIP	15.743,0				
	<i>Layanan Perkantoran</i>	12	layanan	30.268,5				
2	Pengendalian Pencemaran Udara			22.000,0				
	<i>Penerapan green transportation</i>	1	kota	500,0				
	<i>Penyediaan status mutu udara perkotaan</i>	6	kota	15.750,0				

No.	Program/Kegiatan/Output	Target	Satuan	Alokasi (Juta Rupiah)	Lokasi	Kegiatan Prioritas	Program Prioritas	Prioritas Nasional
	<i>Peningkatan proporsi jumlah industri yang memenuhi baku mutu emisi</i>	188	industri	2.500,0				
	<i>Peningkatan jumlah kota yang melakukan emantauan kualitas udara untuk penghitungan indeks kualitas udara</i>	400	Kab/Kota	3.250,0				
3	Pengendalian Pencemaran Air			108.581,0				
	<i>Penyediaan informasi data kualitas air secara kontinyu</i>	3	Titik Kontinyu Monitoring	3.000,0				
	<i>Penetapan alokasi beban pencemaran di 15 sungai di 15 DAS Prioritas</i>	2	sungai	1.000,0	Pusat	Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa dan Kawasan termasuk Transmigrasi dan Sumber Daya Hutan	Pembangunan Perdesaan	Pembangunan Wilayah
	<i>Peningkatan kualitas air sungai dengan menurunkan beban pencemaran</i>	12	DAS	72.156,2				
	<i>Perbaikan kualitas sungai melalui kegiatan restorasi</i>	5	sungai	23.343,8	Pusat	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Berkelanjutan termasuk di Kawasan Rawan Bencana	Pencegahan dan Penanggulangan Bencana (a.l Kebakaran Hutan)	Pembangunan Wilayah
	<i>Peningkatan proporsi jumlah industri yang memenuhi baku mutu air limbah</i>	1.800	industri	9.081,0				
4	Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut			135000				
	<i>Jumlah kawasan yang dipulihkan ekosistemnya (pantai lamun, terumbu karang dan vegetasi pantai)</i>	5	Lokasi	5.000,0				
	<i>Jumlah lokasi pesisir dan laut yang dilakukan clean up akibat tumpahan minyak</i>	11	Lokasi	5.000,0				
	<i>Pencegahan dan clean up kawasan pesisir dan laut</i>	8	Lokasi	3.5000				

No.	Program/Kegiatan/Output	Target	Satuan	Alokasi (Juta Rupiah)	Lokasi	Kegiatan Prioritas	Program Prioritas	Prioritas Nasional
5	Pemulihan Kerusakan Lahan Akses Terbuka			9.000,0				
	<i>Proporsi jumlah industri yang meningkat ketaatannya untuk melakukan rehabilitasi pasca tambang sebesar 75% dari 106 industri yang dinilai</i>	18	industri	1.000,0				
	<i>Luas lahan bekas tambang rakyat yang dipulihkan</i>	8	Ha	8.000,0				
6	Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lahan Gambut			15.000,0				
	<i>Pemulihan ekosistem gambut</i>	3.026	ha	15.000,0	Pusat	<i>Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa dan Kawasan termasuk Kawasan Transmigrasi dan Sumber Daya Hutan</i>	<i>Pembangunan Perdesaan</i>	<i>Pembangunan Wilayah</i>
		13	KHG di 4 Prov					
	Badan Restorasi Gambut, Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan			515.277,3				
	<i>Luas lahan gambut yang difasilitasi restorasi gambut pada 7 provinsi rawan kebakaran hutan</i>	400.000	Ha	499.000,0	Pusat	<i>Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Berkelanjutan termasuk di Kawasan Rawan Bencana</i>	<i>Pencegahan dan Penanggulangan Bencana (a.l. Kebakaran Hutan)</i>	<i>Pembangunan Wilayah</i>
	<i>Layanan Perkantoran</i>	12	layanan	16.277,325				
	Jumlah Total			8.025.646,7				

*) Sesuai Pagu Alokasi Anggaran 2018

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SITI NURBAYA